



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

**TAHUN ANGGARAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPRD Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah selama Tahun 2024, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Marabahan, Maret 2025

Kepala Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Barito Kuala



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760519 199703 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target > 100% dan tidak mencapai target < 100. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dari target sebesar Rp. 32.485.978.635,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.832.277.914,- atau 94,91% realisasi tidak memenuhi dari target yang telah ditetapkan namun realisasi mengalami kenaikan sebesar 6,47 % dibanding Tahun 2023 dari target sebesar Rp. 26.247.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.958.584.232,-. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu melakukan evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melakukan monitoring dan evaluasi ke kecamatan dalam rangka penyamaan persepsi kepada aparat desa terkait capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala 2024

(PBB P2), Uji Petik pada objek pajak restoran dan upaya-upaya lainnya yang terus dilakukan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara rinci pencapaian target Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja Nilai Penerimaan Pajak Daerah mencapai 94,91%
2. Realisasi Kinerja Nilai Penerimaan Retribusi Daerah mencapai 110,56%
3. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama. Rata-rata capaian meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 96,07%
4. Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Pajak Reklame 127,50%
 - b. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Pajak Sarang Burung Walet 88,59%
 - c. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 95,10%
 - d. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 62,52%
 - e. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari PBJT-Makanan dan/atau Minuman 131,29%
 - f. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Pajak PBJT-Tenaga Listrik 111,45%
 - g. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Pajak PBJT-Jasa Perhotelan 77,14%
 - h. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Pajak PBJT-Jasa Parkir 139,04 %
 - i. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Pajak PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 60,53%
 - j. Capaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Retribusi Daerah 83,81 %

5. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan rata-rata target akhir Renstra telah mencapai 94,91%.
6. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.909.525.837,- (96,84%), sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 4.502.701.309,- (89,87%) sehingga total realisasi keuangan APBD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 adalah Rp. 9.046.997.059,- (92,98%).
7. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah **Efektif**.
8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala **Sangat Efisien**.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
 1.1. Latar Belakang.	 1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi.	1
1.3. Fungsi Strategis.	4
1.4. Isu Strategis Organisasi.	4
1.5. Landasan Hukum.	6
1.6. Sistematika.	7
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis.	8
2.1.1. Tujuan dan Sasaran.	8
2.1.2. Indikator Tujuan	9
2.2. Perjanjian Kinerja	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Akuntabilitas Kinerja.	11
3.2. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.	12
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	24
3.3.1. Pengukuran Kinerja	24
3.3.2. Evaluasi Kinerja	26
3.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif solusi	33
3.5.1. Analisis Capaian Kinerja	30
3.5.2. Indikator kinerja	34
3.6. Akuntabilitas Keuangan	36
3.6.1. Efektifitas	38
3.6.2. Analisa Efisiensi	40
 BAB IV PENUTUP	 41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama BPPRD Kab. Batola Tahun 2024	9
Tabel 2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) BPPRD Kab. Barito Kuala Tahun 2024	10
Tabel 3.1.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja	11
Tabel 3.1.2. Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja yang tidak tercapai	12
Tabel 3.2.1. Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Kinerja	12
Tabel 3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dan 2023	13
Tabel 3.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi terhadap target akhir Renstra	16
Tabel 3.2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan angka Absolut	17
Tabel 3.2.5. Capaian Indikator Utama berdasarkan Angka Mutlak	21
Tabel 3.2.6. Capaian IKU BPPRD Tahun 2024	22
Tabel 3.2.7. Capaian IKU BPPRD berdasarkan Prosentase	23
Tabel 3.2.8. Capaian IKU BPPRD berdasarkan Kategori	23
Tabel 3.3.1. Capaian Kinerja Sasaran BPPRD Tahun 2024	24
Tabel 3.3.2. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran BPPRD berdasarkan IKU	25
Tabel 3.3.3. Capaian Kinerja Sasaran BPPRD Tahun 2024	25
Tabel 3.3.4. Pencapaian Target Sasaran Strategis BPPRD Tahun 2024	26
Tabel 3.4.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Tahun ini	28
Tabel 3.4.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Prosentase Realisasi Kinerja (2023-2024)	29
Tabel 3.4.3. Komposisi Belanja BPPRD Kabupaten Barito Kuala	30
Tabel 3.4.4. Efisiensi Sumber Daya Terhadap Capaian Kinerja BPPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	32 35
Tabel 3.4.5. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024	35
Tabel 3.4.6. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	36
Tabel 3.4.7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Target dalam Renstra	36
Tabel 3.4.8. Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024	40
Tabel 3.4.9. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024	42
Tabel 3.4.10. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	43
Tabel 3.4.11. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 terhadap Target dalam Dokumen Renstra Nilai Evaluasi SAKIP	43
Tabel 3.4.12. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD terhadap Standar Nasional	44
Tabel 3.4.13. Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024	45
Tabel 3.4.14. Komposisi BPPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 Setelah Perubahan	48
Tabel 3.4.15. Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024	49
Tabel 3.4.16. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2020, tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui tindakan pelayanan, pengawasan dan pembinaan dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukan hanya berupa kegiatan dalam lingkup administratif belaka, oleh karenanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat berkaitan dengan tata kelola dan masuk kedalam lingkup kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam kajian administrasi perpajakan, salah satu ruang lingkup dalam administrasi perpajakan adalah tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (collection) di suatu daerah.

Terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah juga termasuk ke dalam Penerimaan Daerah dan untuk membiayai pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut Retribusi Daerah. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan Retribusi Daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan Retribusi Daerah dapat dilakukan beberapa kali sepanjang Wajib Retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut

kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas Rencana Kerja SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2024.

a. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah :

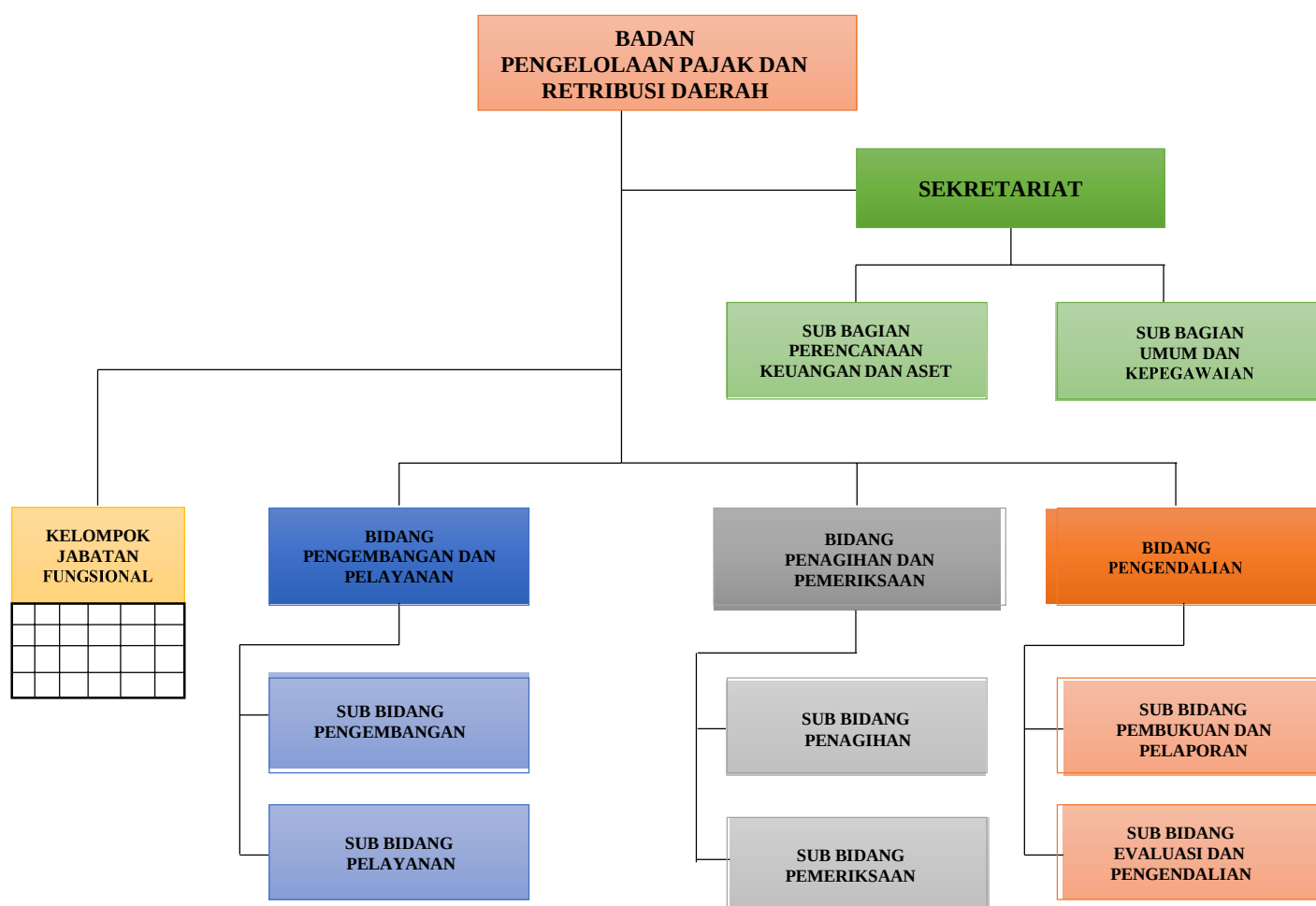
- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penghasil Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan 3 (tiga) Kepala Bidang dimaksud yaitu 1) Bidang Pengembangan dan Pelayanan; 2) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dan 3) Bidang Pengendalian dan masing-masing Kapala Bidang dibantu 2 (dua) Kapala Sub Bidang. Bidang Pengembangan dan Pelayanan terdiri dari Sub Bidang Pengembangan dan Sub Bidang Pelayanan, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

terdiri dari Sub Bidang Penagihan dan Sub Bidang Pemeriksaan, Bidang Pengendalian terdiri dari Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian dan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Sekretaris terdiri dari Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset (PKA) dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Umpeg) dengan Struktur Organisasi sebagai gambaran, kami sajikan Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



1.3. Fungsi Strategis

Fungsi Strategis menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa strategi sesuai dengan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- 1) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk taat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Melaksanakan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Melaksanakan sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi.
- 4) Melaksanakan pengembangan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Melaksanakan pendataan terhadap potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7) Menyiapkan kemampuan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima.
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
- 9) Meningkatkan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
- 10) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

1.4. Isu Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Belum optimalnya penerapan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan sistem penerapan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) Masih terdapat data Wajib Pajak dan Objek Pajak yang belum valid
- 5) Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian Potensi Penerimaan Daerah

Isu Strategis yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala antara lain :

1. Lebih intensif melakukan koordinasi terkait Retribusi Daerah dengan SKPD Penghasil Retribusi.
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM bagi aparaturnya melalui kegiatan Bimtek ataupun Diklat sesuai bidang tugas yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Perlunya penambahan SDM guna mendukung program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Perlunya melakukan pendataan secara berkala terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada Wajib Pajak untuk kepatuhan dalam membayar pajak.
6. Menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar Pajak berdasarkan aturan yang berlaku.
7. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara digital.
8. Memberikan reward atau undian menarik kepada wajib pajak yang taat pajak.
9. Memberikan stimulus dan insentif pajak seperti pengurangan tarif pajak atau penghapusan denda pajak setiap momen Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala.

1.5. Landasan Hukum

1. Undan-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 61 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa tertentu.

1.6. SISTEMATIKA.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/255/KUM/2018, tanggal 4 Juni Tahun 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2023–2026 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala maka Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah :

1) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki dengan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Mengembangkan Potensi Lokal dengan Indikator Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah.

2) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah.
- Sedangkan sasaran yang terkait dengan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi Sakip Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2.1.2. Indikator Tujuan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah.

Tabel 2.1.3

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi	Nilai PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah
				Nilai Penerimaan Retribusi Daerah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab	Nilai SAKIP Pemkab	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD

2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp)	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp	32.476.978.635,-	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.486,-
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	3.552.046.365,-		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	74,94	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	7.029.946.573,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang, menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.

Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama, yang meliputi Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah, dengan demikian Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 3.2.1.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	94,91
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	3.552.046.365,-	2.977.143.727,-	83,81
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	74,94	73,02	97,43

Indikator Kinerja 1 Tahun 2024 secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dari 9 (Sembilan) mata pajak yang menjadi sumber pendapatan Pajak Daerah ada 5 (lima) Pajak Daerah yang tidak tercapai yaitu Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT-Jasa Perhotelan, dan PBJT-Kesenian dan Hiburan.

Indikator Kinerja 2 Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan Target Rp 3.868.327.365 Realisasi 2.977.143.727 (83,81%), ada 8 SKPD Penghasil yang tidak memenuhi Target yaitu Dinas Pendidikan (94,96%), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (75,60%), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (79,62%), Dinas Lingkungan Hidup (74,94%), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (86,68%), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (83,53%), Dinas Perkebunan dan Peternakan (87,05%), Sekretariat Daerah (42,83%).

Indikator Kinerja 3 Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki target 74,94 dengan realisasi 73,02 (97,43). Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah hasil penilaian atas fakta objektif Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, nilai ini menunjukkan tingkat Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 3.2.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023		% Capaian	TAHUN 2024		% Capaian
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	26.240.000.000,-	28.953.674.232,-	110,34	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	94,91
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	7.500.000,-	4.910.000,-	65,47	3.552.046.365,-	2.977.143.727,-	83,81
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	75,00	70,15	93,53	74,94	73,02	97,43

Nilai Penerimaan Pajak Daerah

Tahun 2024 target Pajak Daerah sebesar Rp. 32.485.978.635,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.832.277.914,- capaian 94,91 % naik dibanding dengan Tahun 2023 target sebesar Rp. 26.247.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.958.584.232,- capaian 110,32% hal ini disebabkan adanya usaha-usaha yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyebabnya adalah :

1. Hasil evaluasi pendapatan Tahun 2023 yang menjadi acuan dalam penentuan target Tahun 2024
2. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 30.832.277.914,- mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar Rp 28.958.584.232,- atau 6,47%
3. Dari 9 (sembilan) mata Pajak Daerah terdapat 7 (tujuh) mata Pajak Daerah yang mengalami kenaikan Penerimaan Pendapatan yaitu PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Parkir, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini disebabkan adanya usaha-usaha yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Pajak Reklame Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,93%, hal tersebut karena adanya pendataan Pajak Reklame baru, kemudian dilakukan penagihan sehingga menambah nilai penerimaan terhadap Pajak Reklame.
 - Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 Ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,94%, hal tersebut karena adanya kegiatan pendataan dan penagihan yang intens sehingga menambah potensi Pendapatan Asli Daerah bagi Pajak Sarang Burung Walet.
 - Realisasi PBB-P2 Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,28%, dengan adanya pendataan PBB-P2, adanya penambahan Objek Pajak baru serta adanya kegiatan penagihan sehingga mampu menambah Potensi PBB-P2 dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
 - Realisasi BPHTB Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 15,58% dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah meskipun telah dilakukan program Bayar Pajak Tanpa Denda (BAPANDA) Tahun 2024. Masih banyak data PBB-P2 yang belum valid seperti NOP ganda, Alamat WP tidak dapat ditelusuri maka SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak serta kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 yang masih rendah.
 - Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan 23,66 % karena dengan adanya sosialisasi ke SKPD, Desa, Kecamatan, UPT, Sekolah, dan Puskesmas terhadap Aplikasi E-SPTPD online diwilayah Kabupaten Barito Kuala sehingga menambah potensi dan realisasi penerimaan Pajak PBJT-Makanan dan/atau Minuman, serta adanya intensifikasi dan penambahan alat transaksi online kepada rumah makan.
 - Realisasi PBJT-Tenaga Listrik Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,89% karena adanya penambahan pemasangan pelanggan listrik baru dan meningkatnya pemakaian listrik.

- Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,15% dikarenakan potensi objek pajak PBJT Jasa Perhotelan yang ada di Kabupaten Barito Kuala hanya sebanyak 4 buah dan jumlah tamu hotel/pengunjung sangat sedikit. Alasan lainnya yakni Hotel Prima Batola milik Pemda belum beroperasi, karena masih renovasi.
- Realisasi PBJT-Jasa Parkir tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 79,30% karena sudah dilakukannya uji petik dan dengan adanya koordinasi dengan pihak Indomaret hasilnya jauh diatas dari yang sebelumnya sehingga dinaikkan pembayaran perbuah Indomaret, dan juga adanya penambahan Objek Pajak Parkir baru di Indomaret.
- Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,83% dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala, sehingga banyak pengusaha permainan dan ketangkasan yang menampilkan acara hiburan sehingga bisa dipungut Pajak Kesenian dan Hiburan.
- Realisasi Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 102,66%, hal ini karena dilakukannya Pendataan ulang terhadap penghuni Rumah Dinas sehingga mudah dalam Penagihan Retribusi Rumah Dinas tersebut.

Target Pajak Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 23,77%. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan 6,47%. Kenaikan realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dibandingkan realisasi Tahun 2023 dari Pajak Reklame, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, dan PBJT-Jasa Parkir. Kenaikan realisasi ini antara lain karena sudah dilakukannya uji petik dan dengan adanya koordinasi dengan pihak Indomaret sehingga hasilnya jauh di atas dari sebelumnya lalu dinaikkanlah pembayaran perbuah dan penambahan Objek Pajak Parkir Baru di Indomaret. Ada beberapa pajak yang mengalami penurunan seperti Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT-Jasa Perhotelan, dan PBJT-Kesenian dan Hiburan. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan produksi petani walet dan penurunan harga sarang burung walet dari pihak pembeli, pendistribusian SPPT PBB yang tidak maksimal dan terlambatnya pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sebagian dipakai desa-desa untuk melakukan kegiatan penagihan PBB-P2 menjadi salah satu penyebab menurunnya realisasi PBB-P2, tuntutan target BPHTB terlalu tinggi sedangkan potensi BPHTB di Kabupaten Barito Kuala tidak sebanding dengan investasi yang ada, potensi Objek Pajak PBJT Jasa Perhotelan yang ada di Kabupaten Barito Kuala hanya sebanyak 4 buah dan jumlah tamu hotel/pengunjung sangat sedikit.

Alasan lainnya yakni Hotel Prima Batola milik Pemerintah Daerah belum beroperasi karena masih renovasi, Objek Pajak Hiburan yang ada di Kabupaten Barito Kuala hanya sedikit yaitu sebanyak 1 buah yaitu Water Boom Yasmin Residen Handil Bakti, jumlah pengunjung hiburan setiap saat terus berkurang hal tersebut karena tidak adanya inovasi dari pemilik pajak hiburan waterboom yasmin residen akibatnya banyak pengunjung berpindah atau memilih hiburan di kota-kota lainnya.

Upaya yang dilakukan Tahun 2025 adalah :

1. Tetap melakukan penagihan dan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang belum bayar atau terlambat bayar.
2. Memberikan teguran terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak
3. Melakukan verifikasi dan validasi data PBB-P2 serta penghapusan Piutang PBB-P2
4. Melakukan pendataan dan menetapkan Wajib PBB-P2 yang belum memiliki SPPT PBB-P2 sejak perusahaan tersebut berdiri di Kabupaten Barito Kuala.
5. Mendata dan menagih pajak katering perusahaan dengan langsung mendatangi perusahaan-perusahaan.
6. Menyampaikan SPPT PBB-P2 Buku 1,2,3 tidak lagi ke Kecamatan-kecamatan tetapi akan dikumpulkan seluruh Kepala Desa dan Camat di Kabupaten yang penyampaiannya oleh Bupati Barito Kuala sekaligus evaluasi penerimaan PBB-P2 untuk tahun-tahun sebelumnya.
7. Melakukan sosialisasi kepada objek pajak baru seperti tenaga listrik pada perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik sendiri.

Nilai Penerimaan Retribusi Daerah

Dalam penyusunan LKIP Tahun 2023 yang menjadi Target Retribusi Daerah hanya yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, sedangkan Tahun 2024 Target Retribusi Daerah sudah termasuk seluruh Target SKPD Penghasil (*Sebagaimana dengan tabel 3.2.2*).

Tabel 3.2.3.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap
Target Akhir Tahun Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	94,91
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	3.552.046.365,-	2.977.143.727,-	83,81
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	74,94	73,02	97,43

Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Tahun 2023-2026 (RENSTRA)

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja (Rp)			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	26.240.000.000,-	26.764.800.000,-	27.300.096.000,-	27.846.097.920,-
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	7.500.000,-	9.000.000,-	9.540.000,-	10.112.400,-

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

Target Pajak Daerah pada Renstra Tahun 2024 sebesar Rp. 26.764.800.000,- lebih rendah dibandingkan target kinerja Tahun 2024 sebesar Rp 32.476.978.635,- hal dikarenakan adanya tuntutan untuk menaikkan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024.

Target Retribusi Daerah pada Renstra Tahun 2024 sebesar Rp. 7.650.000,- jauh lebih rendah dibandingkan target kinerja Tahun 2024 sebesar Rp. 3.868.327.365,- hal ini disebabkan karena pada Renstra merupakan Target Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sedangkan Target Kinerja Retribusi Daerah adalah Target Retribusi Daerah seluruh SKPD Penghasil.

Tabel 3.2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi Berdasarkan Angka Absolut
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	94,91
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	3.552.046.365,-	2.977.143.727,-	83,81
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	74,94	73,02	97,43

- Pada Tahun 2024 Realisasi Nilai Penerimaan Pajak Daerah 94,91%, angka ini diperoleh dengan cara :

Realisasi Nilai Penerimaan Pajak Daerah 2024 x 100%

Target Nilai Penerimaan Pajak Daerah 2024

30.822.327.264 x 100% = 94,91%

32.476.978.635

- Pada Tahun 2024 Realisasi Nilai Penerimaan Retribusi Daerah 110,56%, angka ini diperoleh dengan cara :

Realisasi Nilai Penerimaan Retribusi Daerah 2024 x 100%

Target Nilai Penerimaan Retribusi Daerah 2024

2.977.143.727 x 100% = 83,81%

3.552.046.365

Dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama ini kurang dari 100%

Ada 5 mata Pajak Daerah yang tidak mencapai 100% yaitu Pajak Sarang Burung Walet (88,59%), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (95,10%), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (62,52%), PBJT-Jasa Perhotelan (77,14%), dan PBJT-Kesenian dan Hiburan (60,53%) hal ini dikarenakan :

1. Pajak Sarang Burung Walet masih rendah karena Sarang Burung Walet banyak belum berproduksi berdasarkan informasi dari Wajib Pajak, dikarenakan Self Assesment sehingga pendapatan Pajak Sarang Burung Walet cukup kecil. Pemilik atau pengusaha tidak berdomisili ditempat usaha sehingga sulit ditemui, dan harga/produksi Sarang Burung Walet menurun serta kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), realisasi 95,10% dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah meskipun telah dilakukan program bayar pajak tanpa denda (BAPANDA) Tahun 2024. Masih banyak data PBB-P2 yang belum valid seperti NOP ganda, alamat Wajib Pajak tidak dapat ditelusuri maka SPPT tidak sampai ke Wajib Pajak serta kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 yang masih rendah.
3. PBJT-Jasa Perhotelan, realisasi 77,14% dikarenakan potensi Objek Pajak PBJT-Jasa Perhotelan yang ada di Kabupaten Barito Kuala hanya sebanyak 4 buah dan jumlah tamu Hotel/pengunjung sangat sedikit. Alasan lainnya Hotel Prima Batola milik Pemerintah Daerah belum beroperasi, karena masih direnovasi.
4. PBJT-Kesenian dan Hiburan, realisasi 60,53% dikarenakan jumlah Objek Pajak Hiburan yang ada di Kabupaten Barito Kuala hanya ada satu buah yaitu Waterboom Yasmin Residence yang pengunjungnya masih sedikit.

Tabel 3.2.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Angka Mutlak Tahun 2024

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	32.476.978.635,-	28.953.674.232,-	30.822.327.264,-	94,91
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.522.046.365,-	4.910.000,-	2.977.143.727,-	83,81
	Total				35.999.025.000,-	28.958.584.232,-	33.799.470.991,-	92,99
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		74,94	70,15	73,02	97,43

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Indikator :

1. Nilai Penerimaan Pajak Daerah
2. Nilai Penerimaan Retribusi Daerah

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD dengan Indikator :

Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD

Tabel 3.2.6.
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	94,91
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	3.552.046.365,-	2.977.143.727,-	83,81
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	74,94	73,02	97,43

Tabel 3.2.7.
Capaian IKU Berdasarkan Prosentase Tahun 2024

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	3
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	0

Dilihat dari tabel di atas Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dan ada 3 Indikator yang tidak tercapai target.

Tabel 3.2.8.
Capaian IKU Berdasarkan Kategori Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.3. Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor : 052/013/BPPRD/2024 Tahun 2024, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	2	94,91 83,81	Tidak Tercapai Tidak Tercapai
2	Sasaran Strategis 2	1	97,64	Tidak Tercapai

Dari tabel di atas artinya Capaian Sasaran Strategis 1 Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah dan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja tidak tercapai target. Untuk memperoleh angka rata-rata capaian sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan IKU Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	Kategori
1	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	94,91	Sangat Baik
	Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	83,81	Baik
2	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	97,64	Sangat Baik

Tabel 3.3.3

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,99 Sangat kurang	50-64,99 Kurang	65-74,99 Cukup	75-89,99 Baik	>90 Sangat Baik
1	1	2	92,99%	0	0	0	0	2
2	2	1	97,64%	0	0	0	0	1

Tabel 3.3.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran	Jumlah	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Tercapainya					
				Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Sasaran Strategis 1	2	92,99%	0	0	0	0	2	92,99
2	Sasaran Strategis 2	1	97,64%	1	0	0	0	0	97,64

Dari tabel di atas terlihat bahwa 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama tingkat pencapaiannya dibawah target yaitu Nilai Penerimaan Pajak Daerah, Nilai Penerimaan Retribusi Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD.

3.4 Evaluasi Kinerja

Sasaran Stategis 1 Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sasaran Strategis ini mendukung tercapainya RPD Tahun 2023-2026 Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017-2022 yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Teknologi Berbasis Pertanian dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran strategi “Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, digunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang digunakan yaitu:

1. Nilai Penerimaan Pajak Daerah.
2. Nilai Penerimaan Retribusi Daerah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	94,91
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	3.552.046.365,-	2.977.143.727,-	83,81

Indikator Kinerja 1 Nilai Penerimaan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja “Nilai Penerimaan Pajak Daerah” merupakan alat untuk mengukur keberhasilan kinerja penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Pajak Daerah yang menjadi wewenang Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :

- a. Pajak Reklame
- b. Pajak Sarang Burung Walet
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- e. PBJT-Makanan dan/atau Minuman
- f. PBJT-Tenaga Listrik
- g. PBJT-Jasa Perhotelan
- h. PBJT-Jasa Parkir
- i. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Untuk mengukur keberhasilan kinerja untuk indikator ini tidak menggunakan rumus/formulasi perhitungan melainkan dihitung berdasarkan total Penerimaan Pajak Daerah pada tahun pelaporan.

Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2024
1. Pajak Reklame	178.504.750,-
2. Pajak Sarang Burung Walet	53.156.250,-
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.804.165.657,-
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.561.920.804,-
5. PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.941.634.702,-
6. PBJT-Tenaga Listrik	17.107.544.278,-
7. PBJT-Jasa Perhotelan	61.708.769,-
8. PBJT-Jasa Parkir	83.426.100,-
9. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	30.265.954,-
Jumlah	30.822.327.264,-

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja ” Nilai Penerimaan Pajak Daerah” ditetapkan target sebesar Rp. 32.476.978.635,-

Tahun 2024 tersebut Nilai Penerimaan Pajak Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 30.822.327.264,- dengan demikian capaian kinerja Indikator Kinerja ”Nilai Penerimaan Pajak Daerah” adalah 94,91% (Rp. 30.822.327.264,- / Rp. 32.476.978.635,- = 94,91%)

Tabel 3.4.1

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	94,91

Berdasarkan Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja “Indikator Kinerja Utama Nilai Penerimaan Pajak Daerah” Tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan adanya tuntutan untuk menaikkan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pajak Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	28.953.674.232,-	30.822.327.264,-

Dari Tabel 3.4.2 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Nilai Penerimaan Pajak Daerah” mengalami kenaikan sebesar 6,45% dibanding dengan tahun sebelumnya (2023) dapat diartikan bahwa Analisis keberhasilan terhadap target indikator kinerja pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah yang realisasi capaiannya adalah **Tercapai**. Hal ini disebabkan adanya usaha-usaha yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah melalui Penerimaan Pajak Daerah.

Yang menjadi solusi dalam upaya keberhasilan tersebut adalah meniadakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karna keberhasilan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah sesuai dengan regulasi terbaru. Selanjutnya dengan adanya pengembangan Aplikasi Pajak Daerah (SIMPATDA), penambahan pemasangan Alat Transaksi Pajak Online (Tapping Box) khususnya pada PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Kesenian dan Hiburan, serta kegiatan Penagihan dan evaluasi yang intens juga menjadi upaya dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan Pajak Daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi Kinerja Indikator “Nilai Penerimaan Pajak Daerah” Tahun 2024 sebesar Rp. 30.822.327.264,- dan berdasarkan dalam dokumen Renstra untuk Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 26.764.800.000,- (15,15%).

Tabel 3.4.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai Pajak Daerah
Terhadap Target Dalam Dokumen Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024 Rp.	Realisasi Tahun 2024 Rp.	Target RENSTRA (2024)	Persentase Capaian s/d Tahun 2024 Terhadap Renstra
Nilai Penerimaan Pajak Daerah	32.476.978.635,-	30.822.327.264,-	27.552.000.000,-	21,34%

Berdasarkan Tabel 3.4.3 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 telah mencapai 21,34 %.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Analisis penyebab keberhasilan terhadap target indikator Nilai Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 yang realisasi capaiannya adalah **Tercapai**, hal ini disebabkan semakin optimalnya strategi dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah.

Yang menjadi solusi dalam upaya keberhasilan tersebut adalah meniadakanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena keberhasilan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah sesuai dengan regulasi terbaru. Selanjutnya dengan adanya pengembangan Aplikasi Pajak Daerah (SIMPATDA), penambahan pemasangan Alat Transaksi Pajak Online (Tapping Box) khususnya pada PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Kesenian dan Hiburan, serta kegiatan penagihan dan evaluasi yang intens juga menjadi upaya dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan Pajak Daerah.

Analisis Penyebab Kegagalan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 , berdasarkan Target Tahun 2024 karena :

1. Tuntutan target Pajak Daerah Tahun 2024 terlalu tinggi dibeberapa mata Pajak Daerah seperti PBB-P2 dan BPHTB.
2. Kurangnya Potensi Pajak Daerah di Wilayah Kabupaten Barito Kuala seperti PBJT-Jasa Perhotelan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Melakukan Pemutakhiran data Wajib Pajak dan Objek Pajak.
2. Melakukan Penagihan aktif.
3. Melakukan digitalisasi sistem Pemungutan Pajak (Aplikasi Pajak).
4. Melakukan Penghapusan denda batas jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
5. Peningkatan SDM dengan mengikuti Bimtek Perpajakan.
6. Melakukan pengawasan untuk meminimalkan potensi kebocoran.
7. Adanya penambahan Objek Pajak Baru.
8. Memasang alat transaksi pembayaran online pada Objek Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan.
9. Pemberian Reward terhadap Wajib Pajak PBB-P2 yang lunas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan indikator “Nilai Penerimaan Pajak Daerah” telah dianggarkan dalam DPA Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 32.485.978.635,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 30.832.277.914,- (94,91%).

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor :188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

Cki = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

Maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian Kinerja Indikator “Nilai Penerimaan Pajak Daerah” adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(32.485.978.635 \times 94,91\%) - 30.832.277.914}{32.485.978.635 \times 94,91\%} \times 100\% \\
 &= \frac{3.083.244.232.247,9 - 30.832.277.914}{3.083.244.232.247,9} \times 100\% \\
 &= \frac{3.052.411.954.333,9}{3.083.244.232.247,9} \times 100\% = \\
 &= 99,00\%
 \end{aligned}$$

Program	Pagu Anggaran (Rp)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.486,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Nilai Pajak Daerah sebesar 99,00% termasuk dalam batas kategori efisien, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.4
Efisiensi Sumber Daya Terhadap Capaian Kinerja
BPPRD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	94,91 %	97,13%	99,00%

Dari Tabel diatas tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Penerimaan Pajak Daerah sebesar 99,00%.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Penerimaan Pajak Daerah.

Untuk menunjang pencapaian kinerja indikator “Nilai Penerimaan Pajak Daerah” dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)		%	Kegiatan	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.485	1.959.130.645	97,13	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.485,-	1.959.130.645,-	97,13
	Jumlah	2.017.050.485	1.959.130.645	97,13		2.017.050.485,-	1.959.130.645,-	97,13

Indikator Kinerja 2 Nilai Penerimaan Retribusi Daerah.

Indikator Kinerja “Nilai Penerimaan Retribusi Daerah” sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi atau Badan.

Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Terminal
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - e. Retribusi Penyeberangan di Air
 - f. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

2. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi Pemberian PBG
- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Untuk mengukur keberhasilan kinerja untuk indikator ini tidak menggunakan rumus/formulasi perhitungan melainkan dihitung berdasarkan total penerimaan Retribusi Daerah pada tahun pelaporan.

Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2024
A. RETRIBUSI JASA UMUM	
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	32.270.000,-
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	105.135.000,-
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.040.000,-
4. Retribusi Pelayanan Pasar	211.580.000,-
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,-
B. RETRUBUSI JASA USAHA	
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	963.759.650,-
2. Retribusi Terminal	7.200.000,-
3. Retribusi Rumah Potong Hewan	1.100.000,-
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	148.660.000,-
5. Retribusi Penyeberangan di Air	200.428.000,-
6. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	355.604.000,-
C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	
1. Retribusi Pemberian PBG	833.122.877,-
2. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,-
3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	96.244.200,-
Jumlah	2.977.143.727,-

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja ” Nilai Penerimaan Retribusi Daerah” ditetapkan target sebesar Rp. 9.000.000,- Tahun 2024 tersebut Nilai Penerimaan Retribusi Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 2.977.143.727,- dengan demikian capaian Indikator Kinerja ”Nilai Penerimaan Pajak Daerah” adalah 33.079,37 % (Rp. 2.977.143.727,- / Rp. 9.000.000,- = 33.079,37 %)

Tabel 3.4.5

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	9.000.000,-	2.977.143.727,-	33.079,37

Berdasarkan Tabel 3.4.5 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama Nilai Penerimaan Retribusi Daerah “ tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 (33.079,37 %),

Hal ini dikarenakan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 belum mengakomodir seluruh Penerimaan dari sektor Retribusi Daerah SKPD Penghasil, (namun hanya Retribusi yg diterima secara langsung oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Retribusi Rumah Dinas dan Retribusi Tanah Daerah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.6

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	3.377.718.310,-	2.977.143.727,-

Dari Tabel 3.4.6 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Nilai Penerimaan Retribusi Daerah” mengalami Penurunan sebesar 11,86 % dibanding dengan Tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi Kinerja Indikator “Nilai Penerimaan Retribusi Daerah” Tahun 2024 sebesar Rp. 2.977.143.727,- dan berdasarkan dalam dokumen Renstra untuk Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 9.000.000,- atau (33.079,37%).

Tabel 3.4.7

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Target Dalam Dokumen Renstra

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Renstra Thn.2023 Rp.	Realisasi Thn.2024 Rp.	Target RENSTRA (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 Terhadap Renstra
Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	7.500.000	2.977.143.727, -	9.000.000,-	33.079,37%

Berdasarkan Tabel 3.4.7 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 telah melampaui 33.079,37%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Realisasi Retribusi Daerah telah melampaui dari Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2024 yaitu sebesar 33.079,37% disebabkan adanya kesalahan dalam penetapan target baik dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra.

Penetapan Target dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra hanya berdasarkan Retribusi Daerah yang dikelola langsung oleh BPPRD, tidak termasuk Retribusi Daerah dari SKPD Penghasil, sehingga Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah mencapai 33.079,37%.

Pada dasarnya Target Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 3.552.046.365,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.977.143.727 (83.81%).

A. Retribusi Jasa Umum

- Tahun 2024 Target sebesar Rp. 493.500.000,- tidak tercapai dengan realisasi Rp. 371.025.000,- Penurunan ini signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah objek retribusi seperti retribusi pelayanan kesehatan yang sangat jauh turun dibandingkan Tahun 2023 karena sebagian Target Retribusi Pelayanan Kesehatan berubah menjadi Target BLUD. Selain itu penurunan juga disebabkan beberapa faktor lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Retribusi Daerah.

B. Retribusi Jasa Usaha

- Tahun 2024 Target sebesar Rp. 1.897.471.000,- tidak tercapai dengan realisasi Rp. 1.676.751.650,- tetapi ada peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 18.318.075,-. Dari beberapa target Retribusi Jasa Usaha ada realisasi yang tercapai sesuai target, seperti Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penyebrangan di Air dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja SKPD Pemungut Retribusi sudah Sangat Baik dalam mengoptimalkan pendapatan Retribusi Daerah. Sedangkan retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan realisasinya masih di bawah target, hal ini karena saat menentukan target terlalu optimis (tidak berdasarkan perhitungan potensi yang tepat) dan kurangnya kesadaran para wajib Retribusi untuk membayar Retribusi serta kurang aktifnya Penagihan Retribusi.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

- Tahun 2024 Target sebesar Rp. 1.161.075.365,- dengan realisasi Rp. 929.367.077,- Target tidak tercapai. Target dan Realisasi Tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan Target dan Realisasi Tahun 2023. Peningkatan Target Tahun 2024 sebesar Rp. 21.950.000,- dan Peningkatan Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 457.255.342,-. Hal ini menunjukkan kinerja yang lebih baik, tetapi tantangan dalam mencapai target masih perlu diatasi. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menunjukkan peningkatan jauh diatas Target yang telah ditentukan, tentunya hal ini harus diperhatikan agar saat menentukan Target Retribusi pada Tahun mendatang agar disesuaikan dengan potensi yang ada. Sedangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Tahun 2024 realisasinya hanya mencapai 75,60 %. Hal ini dikarenakan Jumlah pengajuan permohonan Izin baik PBG maupun SLF pada tahun 2024 berkurang sebab permohonan izin sekarang melalui Sistem Online Yaitu SIMBG (sejak akhir 2021). Dimana permohonan melalui Sistem SIMBG ini dipersyaratkan menggunakan jasa tenaga ahli yang bersertifikat (berbiaya) dimana hal tersebut dianggap memberatkan kalangan pemohon karena setelah konsultasi terkait adanya biaya diluar retribusi sebagian pemohon banyak yang tidak jadi membuat PBG atau SLF.

Upaya yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah adalah :

1. Melakukan rapat evaluasi capaian retribusi dengan SKPD penghasil untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat pencapaian target retribusi.
2. Membuka ruang diskusi antar-SKPD untuk berbagi solusi dan praktik terbaik guna peningkatan retribusi daerah.
3. Evaluasi Revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Melakukan Pendataan dan Penagihan terhadap Retribusi Rumah Dinas.
5. Melakukan koordinasi dengan Bank Kalsel dalam rangka penggunaan Aplikasi SAPAT (Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Terpadu).

Kendala/Hambatan yang dihadapi Penerimaan Retribusi Daerah :

1. Belum adanya sistem Pengelolaan Retribusi Daerah secara online.
2. Belum adanya Database Retribusi Daerah yang dikelola oleh BPPRD, karena kondisi saat ini Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD Penghasil.
3. Kurangnya kesadaran Wajib Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran.

Upaya yang akan dilakukan kedepan untuk Penerimaan Retribusi Daerah

1. Digitalisasi Sistem Pelayanan dengan mengembangkan aplikasi atau platform online untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin dan membayar retribusi.
2. Optimalisasi Data dan Potensi Lokal dengan melakukan pendataan ulang untuk menjaring potensi retribusi serta memanfaatkan potensi lokal seperti sektor pariwisata atau usaha kecil dan menengah untuk sumber retribusi baru.
3. Mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya retribusi bagi pembangunan daerah.
4. Bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk memperluas cakupan Retribusi Daerah.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah dengan indikator “Nilai Penerimaan Retribusi Daerah” telah dianggarkan dalam DPA Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 2.017.050.485,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.959.130.645,- (97,13%).

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi	= Total pagu Anggaran
CKi	= Capaian Kinerja
RAKi	= Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

Maka tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pencapaian kinerja indikator “Nilai Penerimaan Pajak Daerah” adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(2.017.050.485 \times 33.079,37\%) - 1.959.130.645}{2.017.050.485 \times 33.079,37\%} \times 100\% \\
 &= \frac{66.722.759.301.994 - 1.959.130.645}{66.722.759.301.994} \times 100\% \\
 &= \frac{66.720.800.171.349}{66.722.759.301.994} \times 100\% \\
 &= 99,92\%
 \end{aligned}$$

Program	Pagu Anggaran (Rp)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.486,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Nilai Pajak Daerah sebesar 99,92% termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.8

Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	33.079,37%	97,13%	99,92%

Dari Tabel diatas tingkat Efisiensi penggunaan Sumber Daya Indikator Nialai Pajak Daerah sebesar 99,92%.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Penerimaan Retribusi Dearah.

Untuk menunjang pencapaian Kinerja Indikator “Nilai Penerimaan Pajak Daerah” dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.485,-	1.959.130.645,-	97,13	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.485,-	1.959.130.645,-	97,13
	Jumlah	2.017.050.485,-	1.959.130.645,-	97,13		2.017.050.485,-	1.959.130.645,-	97,13

Sasaran Stategis 2 *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD*

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi oleh unit organisasi/kerja dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja

Sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah**” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi Ke – I RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala”.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran ini ditetapkan **1 (satu)** Indikator Kinerja, yaitu : ”Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD”.

Capaian sasaran dengan **1 (satu)** indikator tersebut pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Evaluasi SAKIP merupakan upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah melalui berbagai upaya pengelolaan organisasi. Rekomendasi hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan pada periode yang akan datang. Dengan memadukan rekomendasi hasil evaluasi dan menerapkan upaya peningkatan capaian evaluasi diharapkan laporan kinerja yang dihasilkan akan lebih baik dan bermanfaat dalam mewujudkan capaian kinerja instansi yang ditetapkan.

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator Nilai SAKIP BPPRD adalah sebagai berikut :

Nilai hasil evaluasi atas SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat pada tahun x

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Barito Kuala telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023, dengan hasil evaluasi yang tertuang dalam Laporan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Nomor : 700/88/IP/2024 tanggal 8 Juli 2024 atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan nilai hasil evaluasi sebesar **73,02** dengan predikat **"BB"**.

Hasil evaluasi tersebut dapat kami jelaskan dengan tabel berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,48
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,66
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,71
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,18
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	BB

Capaian Kinerja atas Indikator Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, indikator kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala” ditetapkan dengan target 74,94, dan Tahun 2024 telah terealisasi dengan Nilai 73,02, Maka capaian kinerja indikator “Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala” Tahun 2024 adalah 97,43% ($73,02 / 74,94 \times 100 = 97,43\%$).

Tabel 3.4.9
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	74,94	73,02	97,43

Sumber data :

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor: 700/88/IP/2024 tanggal 08 Juli 2024

Dari tabel 3.4.9 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 untuk indikator “Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala” adalah 73,02 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.10
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD
Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		Kondisi Awal Renstra	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	74,94	70,15	73,02

Dari Tabel 3.4.10 diatas, diketahui bahwa Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,09% dibanding dengan Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD tahun 2023 (70,15 %).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 terhadap Target Dalam Dokumen Renstra.

Realisasi kinerja indikator “Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD” Tahun 2024 dibanding dengan target yang tercantum dalam dokumen Renstra dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024
Terhadap Target Dalam Dokumen Renstra
Nilai Evaluasi SAKIP

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Realisasi s/d 2024	Target Renstra (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra
Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	74,94	73,02	74,94	97,43%

Dari Tabel 3.4.11 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja s.d tahun 2024 dibandingkan target yang ditetapkan dengan yang tercantum dalam dokumen Renstra adalah sebesar 97,43%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala terhadap standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.12
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD
Terhadap Standar Nasional

No	Indikator /Sub Indikator Kinerja (pilih salah satu)	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			BPPRD Kab. Barito Kuala	Setda Kabupaten Barito Kuala	Pemkab Barito Kuala	
	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	73,02	75,04	68,01	-

Dari Tabel 3.4.12 di atas diketahui bahwa nilai evaluasi SAKIP BPPRD sebesar 73,01, nilai evaluasi SAKIP Setda Kabupaten Barito Kuala sebesar 75,04 dan nilai evaluasi SAKIP Pemkab Barito Kuala sebesar 68,01. Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.

Keberhasilan pencapaian target indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah didukung oleh Kerjasama yang baik dengan bidang teknis, meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja dan melaksanakan perbaikan-perbaikan dengan Instansi terkait seperti Inspektorat, Tim Sakip Batola, dan Bapelitbang.

Kendalanya masih kurangnya pemahaman tentang Sakip yang baik dan benar Upaya yang dilakukan kedepan tahun 2025

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Skpd terkait
2. Meningkatkan pemahaman tentang Sakip terhadap seluruh ASN di BPPRD

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala" dialokasikan dalam DPA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi anggaran untuk indikator "Nilai SAKIP BPPRD" sebesar Rp. 6.556.268.989 dari total pagu sebesar Rp. 7.029.946.573 dengan capaian kinerja sebesar 97,43%.

Formulasi perhitungan Efisiensi Sumber Daya terhadap Sasaran Strategis BPPRD sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(7.029.946.573 \times 97,43\%) - 6.556.268.989}{7.029.946.573 \times 97,43\%} \times 100 \% \\
 &= \frac{684.927.694.607,39 - 6.556.268.989}{684.927.694.607,39} \times 100 \% \\
 &= \frac{678.371.425.618,39}{684.927.694.607,39} \times 100 \% \\
 &= 99,04\%
 \end{aligned}$$

Efisiensi dari Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan perhitungan di atas adalah 99,04%. Rincian Program Pagu anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis 2 tersebut adalah sebagai berikut.

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) :

Program	Pagu Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.029.946.573,-

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dapat diuraikan dengan tabel berikut :

Tabel 3.4.13
Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai SAKIP BPPRD	97,43	93,26	99,04

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Nilai SAKIP oleh telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk Sasaran 2 yang memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan target sebesar 74,94 realisasi sebesar 73,02 dan realisasi anggaran telah mencapai efisiensi sebesar 99,04%.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala” dengan Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun capaian realisasi kinerja dengan kegiatan yang mencapai 100% adalah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPPRD” dengan indikator kinerja “ Nilai SAKIP BPPRD” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.029.946.573,-	6.556.268.989,-	93,26	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.541.880,-	62.219.840,-	94,93
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.010.100.103,-	4.605.873.797,-	91,93
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.912.550,-	155.838.985,-	98,07
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	878.308.330,-	866.091.756,-	98,61
					Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.400.910,-	261.666.293,-	88,88
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.682.800,-	604.578.318,-	97,09
Total		7.029.946.573,-	6.556.268.989,-	93,26		7.029.946.573,-	6.556.268.989,-	93,26

9. Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ada 2 (dua) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang dengan rincian dan pagu anggaran masing-masing sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar Rp. 7.029.946.573,- terdiri dari 6 (Enam) Kegiatan :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 5.010.100.103,-
- Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 65.541.880,-
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 158.912.550,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 878.308.330,00,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 294.400.910,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 622.682.800,-

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.017.050.486,- yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp. 681.249.525,-
- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeriksaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp. 152.617.818,-
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp. 338.558.425,-
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp. 306.219.703,-
- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp. 289.096.222,-
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 249.308.793,-

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar **Rp. 9.046.997.056,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 8.412.227.146,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **92,98%.**

Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.4.14
Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2024 Setelah Perubahan

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.010.100.103,-	4.502.701.309,-	89,87
2	Belanja Langsung	4.036.896.953,-	3.909.525.837,-	96,84
Jumlah		9.046.997.056,-	8.412.227.146,-	92,98

Sumber: SIPD BPPRD 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 89,87%, terhadap realisasi belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, dan sisanya sebesar 96,84% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.036.896.953,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.909.525.837,- atau 96,84%. Dari total Belanja Langsung tersebut pagu yang terkait langsung dengan capaian Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.017.050.486,- selebihnya adalah belanja rutin yang dikelola oleh Sekretariat.

Realisasi Anggaran per program yang mendukung sasaran dan masing masing Indikator Utama (IKU) Badan Pengelolaaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.4.15
Pagu Dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
Dan Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.017.050.486,-	1.959.130.645,-	97,13
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	7.029.946.573,-	6.453.096.501,-	91,79
	Rata-rata Kinerja			9.046.997.056,-	8.412.227.146,-	92,98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besar anggaran program utamayaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mendukung tercapainya indikator Kinerja Utama dengan anggaran sebesar Rp. 2.017.050.486,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.959.130.645,- (97,13%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 7.029.946.573,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.453.096.501,- (92,98).

Tabel 3.4.16

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran %	Realisasi Anggaran (Rp)	Efektifitas
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	94,91	30.822.327.264,-	
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	83,81	2.977.143.727,-	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	97,64	73,02	

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah **Efektif** terhadap pencapaian kinerja sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024, dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghantarkan pada Realisasi Sasaran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala di Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Target tersebut adalah **Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** dengan indikator yaitu Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah serta **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD** dengan Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari tiga Indikator Kinerja Utama adalah 94,91%. Capaian ini masuk kategori sangat baik. Tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya. Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar subbidang dan bidang dan *stakeholder eksternal* lainnya terus dilakukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Walaupun capaian Indikator Kinerja Utama pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini masuk dalam kategori sangat baik, tetapi untuk tahun yang akan datang kami berkomitmen tetap berusaha mempertahankan nilai yang sudah dicapai dan bahkan nilai tersebut harus ditingkatkan lagi.

Rekomendasi Kedepannya perlu ditingkatkan lagi dalam menentukan kegiatan masing-masing Bidang dan Sub Bidang yang lebih mengarah bagaimana caranya bisa meningkatkan kinerja di bidang masing-masing, sehingga akhir dari tujuan semuanya ini adalah meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama Esselon II.

Marabahan, Maret 2025

Kepala Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007

TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA

DESEMBER 2024

URAIAN			TARGET TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2024	REALISASI		SELISIH		PERSEN	KET
					BULAN INI	S.D BULAN LALU	S.D BULAN INI			
1			2	3	4	5	6	7	8	9
PAJAK DAERAH										
	1.	Pajak Reklame	140,000,000.00	140,000,000.00	16,744,250.00	161,760,500.00	178,504,750.00	38,504,750.00	127.50	
	2.	Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00	60,000,000.00	17,206,250.00	35,950,000.00	53,156,250.00	(6,843,750.00)	88.59	
	3.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	211,590,893.00	3,592,574,764.00	3,804,165,657.00	(195,834,343.00)	95.10	
	4.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,496,500,000.00	10,496,500,000.00	1,134,436,720.00	5,427,484,084.00	6,561,920,804.00	(3,934,579,196.00)	62.52	
		Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)								
	5.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2,190,478,635.00	2,240,478,635.00	714,995,237.00	2,226,639,465.00	2,941,634,702.00	701,156,067.00	131.29	
	6.	PBJT-Tenaga Listrik	15,000,000,000.00	15,350,000,000.00	1,488,830,038.00	15,618,714,240.00	17,107,544,278.00	1,757,544,278.00	111.45	
	7.	PBJT-Jasa Perhotelan	80,000,000.00	80,000,000.00	7,930,028.00	53,778,741.00	61,708,769.00	(18,291,231.00)	77.14	
	8.	PBJT-Jasa Parkir	60,000,000.00	60,000,000.00	13,939,800.00	69,486,300.00	83,426,100.00	23,426,100.00	139.04	
	9.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	50,000,000.00	50,000,000.00	-	30,265,954.00	30,265,954.00	(19,734,046.00)	60.53	
TOTAL PENDAPATAN PAJAK DAERAH			32,076,978,635.00	32,476,978,635.00	3,605,673,216.00	27,216,654,048.00	30,822,327,264.00	(1,654,651,371.00)	94.91	
RETRRIBUSI DAERAH										
A.		RETRIBUSI JASA UMUM								
	1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	71,500,000.00	71,500,000.00	2,610,000.00	29,660,000.00	32,270,000.00	(39,230,000.00)	45.13	
	2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	125,000,000.00	125,000,000.00	26,619,000.00	78,516,000.00	105,135,000.00	(19,865,000.00)	84.11	
	3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	26,552,000.00	17,000,000.00	11,160,000.00	10,880,000.00	22,040,000.00	5,040,000.00	129.65	
	4.	Retribusi Pelayanan Pasar	280,000,000.00	280,000,000.00	34,455,000.00	177,125,000.00	211,580,000.00	(68,420,000.00)	75.56	
	5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	120,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	

JUMLAH RETRIBUSI JASA UMUM		623,052,000.00	493,500,000.00	74,844,000.00	296,181,000.00	371,025,000.00	(122,475,000.00)	75.18	
B.	RETRIBUSI JASA USAHA								
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,272,100,000.00	1,226,500,000.00	210,331,150.00	753,428,500.00	963,759,650.00	(262,740,350.00)	78.58	
2.	Retribusi Terminal	4,200,000.00	7,200,000.00	1,850,000.00	5,350,000.00	7,200,000.00	-	100.00	
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	1,100,000.00	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	-	100.00	
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200,000,000.00	177,768,000.00	26,440,000.00	122,220,000.00	148,660,000.00	(29,108,000.00)	83.63	
5.	Retribusi Penyeberangan di Air	250,000,000.00	131,928,000.00	28,146,000.00	172,282,000.00	200,428,000.00	68,500,000.00	151.92	
6.	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	325,300,000.00	352,975,000.00	183,151,000.00	172,453,000.00	355,604,000.00	2,629,000.00	100.74	
JUMLAH RETRIBUSI JASA USAHA		2,052,700,000.00	1,897,471,000.00	450,418,150.00	1,226,333,500.00	1,676,751,650.00	(220,719,350.00)	88.37	
C.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU								
1.	Retribusi Pemberian PBG	1,102,075,365.00	1,102,075,365.00	-	833,122,877.00	833,122,877.00	(268,952,488.00)	75.60	
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	500,000.00	500,000.00	-	-	-	(500,000.00)	0.00	
3.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	90,000,000.00	58,500,000.00	19,122,960.00	77,121,240.00	96,244,200.00	37,744,200.00	164.52	
JUMLAH RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		1,192,575,365.00	1,161,075,365.00	19,122,960.00	910,244,117.00	929,367,077.00	(231,708,288.00)	80.04	
TOTAL PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		3,868,327,365.00	3,552,046,365.00	544,385,110.00	2,432,758,617.00	2,977,143,727.00	(574,902,638.00)	83.81	
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		11,784,220,398.00	11,784,220,398.00	290,950,000.00	11,225,347,184.00	11,516,297,184.00	(267,923,214.00)	97.73	
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		42,396,399,176.00	50,172,480,176.00	7,007,577,568.23	60,277,194,404.73	67,284,771,972.96	17,112,291,796.96	134.11	
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90,125,925,574.00	97,985,725,574.00	11,448,585,894.23	101,151,954,253.73	112,600,540,147.96	14,614,814,573.96	114.92	

Marabahan, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197605191997031007

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS / BADAN / KOMPONEN DAN BAGIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO KUALA DESEMBER 2024																
NO	DINAS / BADAN / KOMPONEN DAN BAGIAN	KODE REKENING					URAIAN	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	Realisasi			Selisih	%	Ket	
										bulan ini	s/d bulan lalu	s/d bulan ini				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	DINAS PENDIDIKAN	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,000,000.00	100,000,000.00	8,163,500.00	86,095,000.00	94,258,500.00	(5,741,500.00)	94.26		
		4	1	02			Retribusi Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	8,163,500.00	86,095,000.00	94,258,500.00	(5,741,500.00)	94.26		
		4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	100,000,000.00	100,000,000.00	8,163,500.00	86,095,000.00	94,258,500.00	(5,741,500.00)	94.26		
		4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	8,163,500.00	86,095,000.00	94,258,500.00	(5,741,500.00)	94.26		
		4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	100,000,000.00	100,000,000.00	8,163,500.00	86,095,000.00	94,258,500.00	(5,741,500.00)	94.26	
Jumlah								100,000,000.00	100,000,000.00	8,163,500.00	86,095,000.00	94,258,500.00	(5,741,500.00)	94.26		
2	DINAS KESEHATAN	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,909,403,176.00	14,909,403,176.00	635,812,956.36	17,987,211,225.15	18,623,024,181.51	3,713,621,005.51	124.91		
		4	1	02			Retribusi Daerah	26,500,000.00	26,500,000.00	1,785,000.00	25,623,500.00	27,408,500.00	908,500.00	103.43		
		4	1	02	01		Retribusi jasa umum	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	(1,500,000.00)	0.00		
		4	1	02	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	(1,500,000.00)	0.00		
		4	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	(1,500,000.00)	0.00	
							Retribusi KIR Kesehatan Calon Jemaah Haji	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	(1,500,000.00)	0.00		
		4	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha	25,000,000.00	25,000,000.00	1,785,000.00	25,623,500.00	27,408,500.00	2,408,500.00	109.63		
		4	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	1,785,000.00	25,623,500.00	27,408,500.00	2,408,500.00	109.63		
		4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25,000,000.00	25,000,000.00	1,785,000.00	25,623,500.00	27,408,500.00	2,408,500.00	109.63	
		4	1	04			Lain-Lain PAD Yang Sah	14,882,903,176.00	14,882,903,176.00	634,027,956.36	17,961,587,725.15	18,595,615,681.51	3,712,712,505.51	124.95		
		4	1	04	16		Pendapatan BLUD	14,882,903,176.00	14,882,903,176.00	634,027,956.36	17,961,587,725.15	18,595,615,681.51	3,712,712,505.51	124.95		
		4	1	04	16	01	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14,882,903,176.00	14,882,903,176.00	634,027,956.36	17,961,587,725.15	18,595,615,681.51	3,712,712,505.51	124.95		
		4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD FKTP dan KU SETARA	14,882,903,176.00	14,882,903,176.00	634,027,956.36	17,961,587,725.15	18,595,615,681.51	3,712,712,505.51	124.95	
Jumlah								14,909,403,176.00	14,909,403,176.00	635,812,956.36	17,987,211,225.15	18,623,024,181.51	3,713,621,005.51	124.91		
3	R S U D " H. ABDUL AZIZ "	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	20,455,996,000.00	20,455,996,000.00	2,479,519,093.39	22,733,859,237.23	25,213,378,330.62	4,757,382,330.62	123.26		
		4	1	4			Lain-Lain PAD Yang Sah	20,455,996,000.00	20,455,996,000.00	2,479,519,093.39	22,733,859,237.23	25,213,378,330.62	4,757,382,330.62	123.26		
		4	1	4	16		Pendapatan BLUD	20,455,996,000.00	20,455,996,000.00	2,479,519,093.39	22,733,859,237.23	25,213,378,330.62	4,757,382,330.62	123.26		
		4	1	4	16	01	Pendapatan BLUD	20,455,996,000.00	20,455,996,000.00	2,479,519,093.39	22,733,859,237.23	25,213,378,330.62	4,757,382,330.62	123.26		
		4	1	4	16	01	0001	Pendapatan BLUD	20,455,996,000.00	20,455,996,000.00	2,479,519,093.39	22,733,859,237.23	25,213,378,330.62	4,757,382,330.62	123.26	
Jumlah								20,455,996,000.00	20,455,996,000.00	2,479,519,093.39	22,733,859,237.23	25,213,378,330.62	4,757,382,330.62	123.26		
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,102,075,365.00	1,102,075,365.00	-	833,122,877.00	833,122,877.00	(268,952,488.00)	75.60		

	DAN PENATAAN RUANG	4	1	02					Retribusi Daerah	1,102,075,365.00	1,102,075,365.00	-	833,122,877.00	833,122,877.00	(268,952,488.00)	75.60	
		4	1	02	03				Retribusi Perizinan Tertentu	1,102,075,365.00	1,102,075,365.00	-	833,122,877.00	833,122,877.00	(268,952,488.00)	75.60	
		4	1	02	03	07			Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,102,075,365.00	1,102,075,365.00	-	833,122,877.00	833,122,877.00	(268,952,488.00)	75.60	
		4	1	02	03	07	0001		Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,102,075,365.00	1,102,075,365.00	-	833,122,877.00	833,122,877.00	(268,952,488.00)	75.60	
Jumlah										1,102,075,365.00	1,102,075,365.00	-	833,122,877.00	833,122,877.00	(268,952,488.00)	75.60	
5	DINAS TENAGA KERJA	4	1						PENDAPATAN ASLI DAERAH	98,100,000.00	66,600,000.00	22,497,960.00	83,448,240.00	105,946,200.00	39,346,200.00	159.08	
	DAN TRANSMIGRASI	4	1	02					Retribusi Daerah	98,100,000.00	66,600,000.00	22,497,960.00	83,448,240.00	105,946,200.00	39,346,200.00	159.08	
		4	1	02	02				Retribusi Jasa Usaha	8,100,000.00	8,100,000.00	3,375,000.00	6,327,000.00	9,702,000.00	1,602,000.00	119.78	
		4	1	02	02	01			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8,100,000.00	8,100,000.00	3,375,000.00	6,327,000.00	9,702,000.00	1,602,000.00	119.78	
		4	1	02	02	01	0001		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8,100,000.00	8,100,000.00	3,375,000.00	6,327,000.00	9,702,000.00	1,602,000.00	119.78	
		4	1	02	03				Retribusi Perizinan Tertentu	90,000,000.00	58,500,000.00	19,122,960.00	77,121,240.00	96,244,200.00	37,744,200.00	164.52	
		4	1	02	03	06			Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	90,000,000.00	58,500,000.00	19,122,960.00	77,121,240.00	96,244,200.00	37,744,200.00	164.52	
		4	1	02	03	06	0001		Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	90,000,000.00	58,500,000.00	19,122,960.00	77,121,240.00	96,244,200.00	37,744,200.00	164.52	
										98,100,000.00	66,600,000.00	22,497,960.00	83,448,240.00	105,946,200.00	39,346,200.00	159.08	
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	4	1						PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,000,000.00	100,000,000.00	14,381,000.00	65,238,000.00	79,619,000.00	(20,381,000.00)	79.62	
	DAN PERIKANAN	4	1	02					Retribusi Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	14,381,000.00	65,238,000.00	79,619,000.00	(20,381,000.00)	79.62	
		4	1	02	02				Retribusi Jasa Usaha	100,000,000.00	100,000,000.00	14,381,000.00	65,238,000.00	79,619,000.00	(20,381,000.00)	79.62	
		4	1	02	02	01			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	28,600,000.00	28,600,000.00	12,200,000.00	17,400,000.00	29,600,000.00	1,000,000.00	103.50	
		4	1	02	02	01	0001		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	28,600,000.00	28,600,000.00	12,200,000.00	17,400,000.00	29,600,000.00	1,000,000.00	103.50	
									Sewa Karamba Jaring Apung	28,600,000.00	28,600,000.00	12,200,000.00	17,400,000.00	29,600,000.00	1,000,000.00	103.50	
		4	1	02	02	11			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	71,400,000.00	71,400,000.00	2,181,000.00	47,838,000.00	50,019,000.00	(21,381,000.00)	70.05	
		4	1	02	02	11	0003		Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	71,400,000.00	71,400,000.00	2,181,000.00	47,838,000.00	50,019,000.00	(21,381,000.00)	70.05	
Jumlah										100,000,000.00	100,000,000.00	14,381,000.00	65,238,000.00	79,619,000.00	(20,381,000.00)	79.62	
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4	1						PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	32,499,000.00	136,211,000.00	168,710,000.00	(1,181,290,000.00)	12.50	
		4	1	02					Retribusi Daerah	225,000,000.00	225,000,000.00	32,499,000.00	136,211,000.00	168,710,000.00	(56,290,000.00)	74.98	
		4	1	02	01				Retribusi Jasa Umum	125,000,000.00	125,000,000.00	26,619,000.00	78,516,000.00	105,135,000.00	(19,865,000.00)	84.11	
		4	1	02	01	02			Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	125,000,000.00	125,000,000.00	26,619,000.00	78,516,000.00	105,135,000.00	(19,865,000.00)	84.11	
		4	1	02	01	02	0001		Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	125,000,000.00	125,000,000.00	26,619,000.00	78,516,000.00	105,135,000.00	(19,865,000.00)	84.11	
		4	1	02	02				Retribusi Jasa Usaha	100,000,000.00	100,000,000.00	5,880,000.00	57,695,000.00	63,575,000.00	(36,425,000.00)	63.58	
		4	1	02	02	01			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	5,880,000.00	57,695,000.00	63,575,000.00	(36,425,000.00)	63.58	
		4	1	02	02	01	0007		Retribusi Pemakaian Alat	100,000,000.00	100,000,000.00	5,880,000.00	57,695,000.00	63,575,000.00	(36,425,000.00)		

		4	1	02	01	05	0002	Retribusi Los	280,000,000.00	280,000,000.00	34,455,000.00	177,125,000.00	211,580,000.00	(68,420,000.00)	75.56	
		4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	235,000,000.00	235,000,000.00	47,822,900.00	187,016,350.00	234,839,250.00	(160,750.00)	99.93	
		4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	235,000,000.00	235,000,000.00	47,822,900.00	187,016,350.00	234,839,250.00	(160,750.00)	99.93	
		4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah	8,000,000.00	8,000,000.00	2,100,000.00	8,500,000.00	10,600,000.00	2,600,000.00	132.50	
		4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah Lokasi Parkir	12,000,000.00	12,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	(2,000,000.00)	83.33	
		4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan Toko, Kios dan Los	200,000,000.00	200,000,000.00	36,490,000.00	161,896,000.00	198,386,000.00	(1,614,000.00)	99.19	
		4	1	02	02	01	0005	Retribus Pemakaian Ruangan / Gudang SRG	15,000,000.00	15,000,000.00	6,732,900.00	9,120,350.00	15,853,250.00	853,250.00	105.69	
Jumlah									515,000,000.00	515,000,000.00	82,277,900.00	364,141,350.00	446,419,250.00	(68,580,750.00)	86.68	
10	DINAS KEPEMUDAAN,	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,000,000.00	51,200,000.00	5,679,000.00	37,089,000.00	42,768,000.00	(8,432,000.00)	83.53	
	OLAHRAGA, BUDAYA DAN	4	1	02				Retribusi Daerah	100,000,000.00	51,200,000.00	5,679,000.00	37,089,000.00	42,768,000.00	(8,432,000.00)	83.53	
	PARIWISATA	4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	100,000,000.00	51,200,000.00	5,679,000.00	37,089,000.00	42,768,000.00	(8,432,000.00)	83.53	
		4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100,000,000.00	51,200,000.00	5,679,000.00	37,089,000.00	42,768,000.00	(8,432,000.00)	83.53	
		4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	100,000,000.00	51,200,000.00	5,679,000.00	37,089,000.00	42,768,000.00	(8,432,000.00)	83.53	
								- Gedung Bulu Tangkis Ije Jela (Siang dan Malam)	10,200,000.00	5,100,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	3,400,000.00	(1,700,000.00)	66.67	
								- Lapangan Tembak	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	100.00	
								- Lapangan Tenis Selidah	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	100.00	
								- Jejangkit Ecopark (Tiket Masuk)	65,200,000.00	32,600,000.00	1,500,000.00	22,310,000.00	23,810,000.00	(8,790,000.00)	73.04	
								- Jejangkit Ecopark (Cottage)	15,000,000.00	7,500,000.00	-	3,350,000.00	3,350,000.00	(4,150,000.00)	44.67	
								- Jejangkit Ecopark (Parkir)	7,200,000.00	3,600,000.00	9,000.00	1,384,000.00	1,393,000.00	(2,207,000.00)	38.69	
								- Jejangkit Ecopark (Wahana Permainan)	-	-	70,000.00	6,495,000.00	6,565,000.00	6,565,000.00	0.00	
								- Jejangkit Ecopark (Warung/Kantin))	-	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
								- Retribusi Tribun Lapangan 5 Desember Marabahan	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	
								- Retribusi Tribun Lapangan 5 Desember Marabahan	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
Jumlah									100,000,000.00	51,200,000.00	5,679,000.00	37,089,000.00	42,768,000.00	(8,432,000.00)	83.53	
11	DINAS PERTANIAN,	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	384,400,000.00	412,075,000.00	236,370,000.00	176,705,000.00	413,075,000.00	1,000,000.00	100.24	
	TANAMAN PANGAN DAN	4	1	02				Retribusi Daerah	384,400,000.00	412,075,000.00	236,370,000.00	176,705,000.00	413,075,000.00	1,000,000.00	100.24	
	HORTIKULTURA	4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	384,400,000.00	412,075,000.00	236,370,000.00	176,705,000.00	413,075,000.00	1,000,000.00	100.24	
		4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	162,500,000.00	162,500,000.00	80,000,000.00	82,500,000.00	162,500,000.00	-	100.00	
		4	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	162,500,000.00	162,500,000.00	80,000,000.00	82,500,000.00	162,500,000.00	-	100.00	
								Retribusi Combine Harvester	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00	
								Retribusi Hand Traktor	112,500,000.00	112,500,000.00	55,000,000.00	57,500,000.00	112,500,000.00	-	100.00	
		4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	221,900,000.00	249,575,000.00	156,370,000.00	94,205,000.00	250,575,000.00	1,000,000.00	100.40	
		4	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	221,900,000.00	249,575,000.00	156,370,000.00	94,205,000.00	250,575,000.00	1,000,000.00	100.40	
								Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Penjualan Bibit Padi	119,400,000.00	144,000,000.00	133,000,000.00	12,000,000.00	145,000,000.00	1,000,000.00	100.69	
								Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Penjualan Bibit Jeruk	102,500,000.00	105,575,000.00	23,370,000.00	82,205,000.00	105,575,000.00	-	100.00	
Jumlah									384,400,000.00	412,075,000.00	236,370,000.00	176,705,000.00	413,075,000.00	1,000,000.00	100.24	
12	DINAS PERKEBUNAN	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	444,100,000.00	445,300,000.00	28,960,000.00	64,876,750.00	93,836,750.00	(351,463,250.00)	21.07	
	DAN PETERNAKAN	4	1	02				Retribusi Daerah	106,600,000.00	107,800,000.00	28,960,000.00	64,876,750.00	93,836,750.00	(13,963,250.00)	87.05	

		4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum	70,000,000.00	70,000,000.00	2,610,000.00	29,660,000.00	32,270,000.00	(37,730,000.00)	46.10	
		4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	70,000,000.00	70,000,000.00	2,610,000.00	29,660,000.00	32,270,000.00	(37,730,000.00)	46.10	
		4	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis	70,000,000.00	70,000,000.00	2,610,000.00	29,660,000.00	32,270,000.00	(37,730,000.00)	46.10	
								Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	70,000,000.00	70,000,000.00	2,610,000.00	29,660,000.00	32,270,000.00	(37,730,000.00)	46.10	
		4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	36,600,000.00	37,800,000.00	26,350,000.00	35,216,750.00	61,566,750.00	23,766,750.00	162.88	
		4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,500,000.00	4,700,000.00	1,250,000.00	4,206,750.00	5,456,750.00	756,750.00	116.10	
		4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3,500,000.00	4,700,000.00	1,250,000.00	4,206,750.00	5,456,750.00	756,750.00	116.10	
								Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan	2,100,000.00	2,100,000.00	900,000.00	1,200,000.00	2,100,000.00	-	100.00	
								Sewa Rumah Dinas	600,000.00	1,800,000.00	-	2,556,750.00	2,556,750.00	756,750.00	142.04	
								Sewa Rumah Kandang Penampungan di Rumah Potong Hewan	800,000.00	800,000.00	350,000.00	450,000.00	800,000.00	-	100.00	
		4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan	1,100,000.00	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	-	100.00	
		4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	1,100,000.00	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	-	100.00	
								Pemeriksaan Ante Mortem	550,000.00	550,000.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-	100.00	
								Pemeriksaan Post Mortem	550,000.00	550,000.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00	-	100.00	
		4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	32,000,000.00	32,000,000.00	24,600,000.00	30,410,000.00	55,010,000.00	23,010,000.00	171.91	
		4	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	32,000,000.00	32,000,000.00	24,600,000.00	30,410,000.00	55,010,000.00	23,010,000.00	171.91	
								Penjualan Karet (Lumb Segar)	12,000,000.00	12,000,000.00	400,000.00	4,800,000.00	5,200,000.00	(6,800,000.00)	43.33	
								Penjualan TBS Sawit	20,000,000.00	20,000,000.00	24,200,000.00	25,610,000.00	49,810,000.00	29,810,000.00	249.05	
		4	1	04				Lain-Lain PAD Yang Sah	337,500,000.00	337,500,000.00	-	-	-	(337,500,000.00)	0.00	
		4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	337,500,000.00	337,500,000.00	-	-	-	(337,500,000.00)	0.00	
		4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	337,500,000.00	337,500,000.00	-	-	-	(337,500,000.00)	0.00	
		4	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan	337,500,000.00	337,500,000.00	-	-	-	(337,500,000.00)	0.00	
								Penjualan Ternak Sapi Penggemukan	337,500,000.00	337,500,000.00	-	-	-	(337,500,000.00)	0.00	
Jumlah									444,100,000.00	445,300,000.00	28,960,000.00	64,876,750.00	93,836,750.00	(351,463,250.00)	21.07	
13	SEKRETARIAT DAERAH	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	372,400,000.00	372,400,000.00	3,575,750.00	155,915,250.00	159,491,000.00	(212,909,000.00)	42.83	
		4	1	02				Retribusi Daerah	372,400,000.00	372,400,000.00	3,575,750.00	155,915,250.00	159,491,000.00	(212,909,000.00)	42.83	
		4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	372,400,000.00	372,400,000.00	3,575,750.00	155,915,250.00	159,491,000.00	(212,909,000.00)	42.83	
		4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	372,400,000.00	372,400,000.00	3,575,750.00	155,915,250.00	159,491,000.00	(212,909,000.00)	42.83	
		4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	336,000,000.00	336,000,000.00	3,575,750.00	155,915,250.00	159,491,000.00	(176,509,000.00)	47.47	
								Retribusi Pemakaian Sewa Prima Batola			-	-	-	-		
								Retribusi Penyewaan Bangunan (Sewa Rumah Dinas)			3,575,750.00	155,915,250.00	159,491,000.00	-		
		4	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	36,400,000.00	36,400,000.00	-	-	-	(36,400,000.00)	0.00	
								Retribusi Pemakaian Aula/Gedung/Guest House	36,400,000.00	36,400,000.00	-	-	-	(36,400,000.00)	0.00	
Jumlah									372,400,000.00	372,400,000.00	3,575,750.00	155,915,250.00	159,491,000.00	(212,909,000.00)	42.83	
14	BADAN PENGELOLAAN	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,379,220,398.00	25,155,301,398.00	4,184,980,518.48	30,807,094,626.35	34,992,075,144.83	9,836,773,746.83	139.10	
	KEUANGAN DAN ASET	4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,784,220,398.00	11,784,220,398.00	290,950,000.00	11,225,347,184.00	11,516,297,184.00	(267,923,214.00)	97.73	
	DAERAH	4	1	03	02			Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	11,784,220,398.00	11,784,220,398.00	290,950,000.00	11,225,347,184.00	11,516,297,184.00	(267,923,214.00)	97.73	
		4	1	03	02	01		Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11,784,220,398.00	11,784,220,398.00	290,950,000.00	11,225,347,184.00	11,516,297,184.00	(267,923,214.00)	97.73	
		4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11,784,220,398.00	11,784,220,398.00	290,950,000.00	11,225,347,184.00	11,516,297,184.00	(267,923,214.00)	97.73	

		4	1	04			Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,595,000,000.00	13,371,081,000.00	3,894,030,518.48	19,581,747,442.35	23,475,777,960.83	10,104,696,960.83	175.57	
		4	1	04	01		Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	100,000,000.00	364,000,000.00	181,410,400.00	632,468,980.00	813,879,380.00	449,879,380.00	223.59	
		4	1	04	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50,000,000.00	350,000,000.00	181,410,400.00	632,468,980.00	813,879,380.00	463,879,380.00	232.54	
		4	1	04	01	02	0054Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30,000,000.00	310,000,000.00	181,410,400.00	443,065,200.00	624,475,600.00	314,475,600.00	201.44	
		4	1	04	01	02	0055Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	15,000,000.00		-	-	(15,000,000.00)	0.00	
		4	1	04	01	02	0057Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	5,000,000.00		160,933,780.00	160,933,780.00	155,933,780.00	3218.68	
		4	1	04	01	02	0122Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	20,000,000.00	10,000,000.00		-	-	(10,000,000.00)	0.00	
		4	1	04	01	02	0136Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	10,000,000.00		28,470,000.00	28,470,000.00	18,470,000.00	284.70	
		4	1	04	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	(14,000,000.00)	0.00	
		4	1	04	01	03	0005Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	(14,000,000.00)	0.00	
		4	1	04	03		Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	36,000,000.00	-	54,118,000.00	54,118,000.00	18,118,000.00	150.33	
		4	1	04	03	01	Hasil Sewa BMD	-	36,000,000.00	-	54,118,000.00	54,118,000.00	18,118,000.00	150.33	
		4	1	04	03	01	0001Hasil Sewa BMD	-	36,000,000.00	-	54,118,000.00	54,118,000.00	18,118,000.00	150.33	
		4	1	04	05		Jasa Giro	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00	348,889,195.35	5,052,973,002.13	5,401,862,197.48	501,862,197.48	110.24	
		4	1	04	05	01	Jasa Giro Pada Kas Daerah	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00	348,889,195.35	5,052,973,002.13	5,401,862,197.48	501,862,197.48	110.24	
		4	1	04	05	01	0001Jasa Giro Pada Kas Daerah	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00	348,889,195.35	5,052,973,002.13	5,401,862,197.48	501,862,197.48	110.24	
		4	1	04	07		Pendapatan Bunga	500,000,000.00	5,300,000,000.00	3,284,129,628.74	11,076,618,400.62	14,360,748,029.36	9,060,748,029.36	270.96	
		4	1	04	07	01	Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500,000,000.00	5,300,000,000.00	3,284,129,628.74	11,076,618,400.62	14,360,748,029.36	9,060,748,029.36	270.96	
		4	1	04	07	01	0001Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500,000,000.00	5,300,000,000.00	3,284,129,628.74	11,076,618,400.62	14,360,748,029.36	9,060,748,029.36	270.96	
							Pendapatan atas Deposito Kas Daerah	500,000,000.00	5,300,000,000.00	3,284,129,628.74	11,076,618,400.62	14,360,748,029.36	9,060,748,029.36	270.96	
		4	1	04	11		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45,000,000.00	2,622,081,000.00	74,153,144.39	2,530,724,356.60	2,604,877,500.99	(17,203,499.01)	99.34	
		4	1	04	11	01	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45,000,000.00	2,622,081,000.00	74,153,144.39	2,530,724,356.60	2,604,877,500.99	(17,203,499.01)	99.34	
		4	1	04	11	01	0001Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45,000,000.00	2,622,081,000.00	74,153,144.39	2,530,724,356.60	2,604,877,500.99	(17,203,499.01)	99.34	
		4	1	04	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah	25,000,000.00	53,000,000.00	2,953,350.00	152,264,690.00	155,218,040.00	102,218,040.00	292.86	
		4	1	04	12	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	25,000,000.00	53,000,000.00	2,953,350.00	152,264,690.00	155,218,040.00	102,218,040.00	292.86	
		4	1	04	12	15	0001Pendapatan Denda PBB-P2	25,000,000.00	53,000,000.00	2,953,350.00	152,264,690.00	155,218,040.00	102,218,040.00	292.86	
		4	1	04	15		Pendapatan Dari Pengembalian	25,000,000.00	96,000,000.00	2,494,800.00	82,580,013.00	85,074,813.00	(10,925,187.00)	88.62	
		4	1	04	15	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25,000,000.00	96,000,000.00	2,494,800.00	82,580,013.00	85,074,813.00	(10,925,187.00)	88.62	
		4	1	04	15	03	0001Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25,000,000.00	96,000,000.00	2,494,800.00	82,580,013.00	85,074,813.00	(10,925,187.00)	88.62	
Jumlah								17,379,220,398.00	25,155,301,398.00	4,184,980,518.48	30,807,094,626.35	34,992,075,144.83	9,836,773,746.83	139.10	
15	BADAN PENGELOLAAN	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	32,085,978,635.00	32,485,978,635.00	3,605,673,216.00	27,226,604,698.00	30,832,277,914.00	(1,653,700,721.00)	94.91	
	PAJAK DAN RETRIBUSI	4	1	01			Pajak Daerah	32,076,978,635.00	32,476,978,635.00	3,605,673,216.00	27,216,654,048.00	30,822,327,264.00	(1,654,651,371.00)	94.91	
	DAERAH	4	1	01	06		Pajak Hotel	80,000,000.00	80,000,000.00	7,930,028.00	53,778,741.00	61,708,769.00	(18,291,231.00)	77.14	
		4	1	01	06	01	Pajak Hotel	80,000,000.00	80,000,000.00	7,930,028.00	53,778,741.00	61,708,769.00	(18,291,231.00)	77.14	
		4	1	01	06	01	0001Pajak Hotel	80,000,000.00	80,000,000.00	7,930,028.00	53,778,741.00	61,708,769.00	(18,291,231.00)	77.14	
		4	1	01	07		Pajak Restoran	2,190,478,635.00	2,240,478,635.00	714,995,237.00	2,226,639,465.00	2,941,634,702.00	701,156,067.00	131.29	

		4	1	0	1	0	7	0	2		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	450,000,000.00	500,000,000.00	55,022,814.00	529,356,670.00	584,379,484.00	84,379,484.00	116.88	
		4	1	0	1	0	7	0	2	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	450,000,000.00	500,000,000.00	55,022,814.00	529,356,670.00	584,379,484.00	84,379,484.00	116.88	
		4	1	0	1	0	7	0	7		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1,740,478,635.00	1,740,478,635.00	659,972,423.00	1,697,282,795.00	2,357,255,218.00	616,776,583.00	135.44	
		4	1	0	1	0	7	0	7	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1,740,478,635.00	1,740,478,635.00	659,972,423.00	1,697,282,795.00	2,357,255,218.00	616,776,583.00	135.44	
		4	1	0	1	0	8				Pajak Hiburan	50,000,000.00	50,000,000.00	-	30,265,954.00	30,265,954.00	(19,734,046.00)	60.53	
		4	1	0	1	0	8	0	9		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (Fitness Center)	50,000,000.00	50,000,000.00	-	30,265,954.00	30,265,954.00	(19,734,046.00)	60.53	
		4	1	0	1	0	8	0	9	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (Fitness Center)	50,000,000.00	50,000,000.00	-	30,265,954.00	30,265,954.00	(19,734,046.00)	60.53	
		4	1	0	1	0	9				Pajak Reklame	140,000,000.00	140,000,000.00	16,744,250.00	161,760,500.00	178,504,750.00	38,504,750.00	127.50	
		4	1	0	1	0	9	0	1		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100,000,000.00	100,000,000.00	16,013,000.00	156,797,375.00	172,810,375.00	72,810,375.00	172.81	
		4	1	0	1	0	9	0	1	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100,000,000.00	100,000,000.00	16,013,000.00	156,797,375.00	172,810,375.00	72,810,375.00	172.81	
		4	1	0	1	0	9	0	2		Pajak Reklame Kain	40,000,000.00	40,000,000.00	731,250.00	4,963,125.00	5,694,375.00	(34,305,625.00)	14.24	
		4	1	0	1	0	9	0	2	0001	Pajak Reklame Kain	40,000,000.00	40,000,000.00	731,250.00	4,963,125.00	5,694,375.00	(34,305,625.00)	14.24	
		4	1	0	1	1	0				Pajak Penerangan Jalan	15,000,000,000.00	15,350,000,000.00	1,488,830,038.00	15,618,714,240.00	17,107,544,278.00	1,757,544,278.00	111.45	
		4	1	0	1	1	0	0	1		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15,000,000,000.00	15,350,000,000.00	1,488,830,038.00	15,618,714,240.00	17,107,544,278.00	1,757,544,278.00	111.45	
		4	1	0	1	1	0	0	1	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15,000,000,000.00	15,350,000,000.00	1,488,830,038.00	15,618,714,240.00	17,107,544,278.00	1,757,544,278.00	111.45	
		4	1	0	1	1	1				Pajak Parkir	60,000,000.00	60,000,000.00	13,939,800.00	69,486,300.00	83,426,100.00	23,426,100.00	139.04	
		4	1	0	1	1	1	0	1		Pajak Parkir	60,000,000.00	60,000,000.00	13,939,800.00	69,486,300.00	83,426,100.00	23,426,100.00	139.04	
		4	1	0	1	1	1	0	1	0001	Pajak Parkir	60,000,000.00	60,000,000.00	13,939,800.00	69,486,300.00	83,426,100.00	23,426,100.00	139.04	
		4	1	0	1	1	3				Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00	60,000,000.00	17,206,250.00	35,950,000.00	53,156,250.00	(6,843,750.00)	88.59	
		4	1	0	1	1	3	0	1		Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00	60,000,000.00	17,206,250.00	35,950,000.00	53,156,250.00	(6,843,750.00)	88.59	
		4	1	0	1	1	3	0	1	0001	Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00	60,000,000.00	17,206,250.00	35,950,000.00	53,156,250.00	(6,843,750.00)	88.59	
		1	1	0	1	1	5				Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	211,590,893.00	3,592,574,764.00	3,804,165,657.00	(195,834,343.00)	95.10	
		4	1	0	1	1	5	0	1		PBB-P2	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	211,590,893.00	3,592,574,764.00	3,804,165,657.00	(195,834,343.00)	95.10	
		4	1	0	1	1	5	0	1	0001	PBB-P2	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	211,590,893.00	3,592,574,764.00	3,804,165,657.00	(195,834,343.00)	95.10	
		4	1	0	1	1	6				Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,496,500,000.00	10,496,500,000.00	1,134,436,720.00	5,427,484,084.00	6,561,920,804.00	(3,934,579,196.00)	62.52	
		4	1	0	1	1	6	0	1		BPHTB - Pemindahan Hak	10,496,500,000.00	10,496,500,000.00	1,134,436,720.00	5,427,484,084.00	6,561,920,804.00	(3,934,579,196.00)	62.52	
		4	1	0	1	1	6	0	1	0001	BPHTB - Pemindahan Hak	10,496,500,000.00	10,496,500,000.00	1,134,436,720.00	5,427,484,084.00	6,561,920,804.00	(3,934,579,196.00)	62.52	
		4	1	0	2						Hasil Retribusi Daerah	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,950,650.00	9,950,650.00	950,650.00	110.56	
		4	1	0	2	0	2				Retribusi Jasa Usaha	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,950,650.00	9,950,650.00	950,650.00	110.56	
		4	1	0	2	0	2	0	1		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,950,650.00	9,950,650.00	950,650.00	110.56	
		4	1	0	2	0	2	0	1	0001	Retibusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,950,650.00	9,950,650.00	950,650.00	110.56	
Jumlah												32,085,978,635.00	32,485,978,635.00	3,605,673,216.00	27,226,604,698.00	30,832,277,914.00	(1,653,700,721.00)	94.91	
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH												90,125,925,574.00	97,985,725,574.00	11,448,585,894.23	101,151,954,253.73	112,600,540,147.96	14,614,814,573.96	114.92	

Marabahan, 31 Desember 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 197605191997031007

KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN 2024

KEGIATAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TAHUN 2024

**Pelatihan bahasa isyarat untuk petugas pelayanan lingkup pemerintah daerah kabupaten barito kuala
Di aula mufakat setda**



Menghadiri undangan narasumber pbb-p2 di Kelurahan Handil Bakti



Survei lapangan pengukuran bangunan objek pajak di Kecamatan Alalak



Pelayanan pajak daerah di kantor Kecamatan Alalak



Menghadiri kegiatan ekspose penyusunan ZNT BPN



Menghadiri sosialisasi kegiatan bidang pengadaan tanah dan pengembangan



Pelayanan pajak daerah di kantor Kecamatan Alalak



Pelayanan pajak daerah di Mal Pelayanan Publik Batola



Survei lapangan pengukuran bangunan objek pajak di Kecamatan Alalak



KEGIATAN SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN TAHUN 2024
Pembagian SPPT buku 4 5 di Banjarmasin



Pembagian DHKP dan SPPT di Kecamatan Alalak





BPPRD
Kabupaten Barito Kuala

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



UPDATE //

PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB BUKU 4 DAN 5 TAHUN 2024 KEPADA PLN UP3 BANJARMASIN

 bp2rdbatola@gmail.com  [@bpprdkab.batola](https://www.instagram.com/bpprdkab.batola)  [Bpprd Kab Batola](https://www.facebook.com/Bpprd Kab Batola)  [0811 5010 344](https://wa.me/08115010344)

KEGIATAN SUB BIDANG PENGENDALIAN TAHUN 2024

Rapat Koordinasi DBH



PGD Pengelolaan Retribusi Daerah dan Evaluasi Capaian Retribusi Tahun 2024 sekaligus pengenalan Aplikasi SAPAT



Evaluasi PBB-P2 dan PBJT Makan dan Minum



Rapat Finalisasi DBH



**Rekapitulasi Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2024**

NO	JENIS PAJAK	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JLH
1	PAJAK REKLAME	0	0	6	1	17	3	32	15	20	16	14	16	140
2	PAJAK SARANG BURUNG WALET	1	1	0	0	1	0	8	3	1	0	0	4	19
3	PBB-P2	135	12	0	425	84	107	117	149	321	302	310	142	2104
4	BPHTB	178	126	112	138	155	140	160	204	211	119	142	107	1792
5	PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	21	212	409	697	562	803	1542	1279	1060	1650	1000	3927	13162
6	PAJAK TENAGA LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PBJT-JASA PERHOTELAN	4	5	3	2	2	5	3	3	3	3	4	4	41
8	PBJT-JASA PARKIR	21	22	34	22	24	10	34	14	24	24	24	24	277
9	PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
10	RETRIBUSI SEWA TANAH DAN BANGUNAN	3	1	1	2	11	48	20	2	0	1	0	0	89
	Jumlah	366	390	565	1287	856	1116	1916	1669	1640	2115	1494	4224	17638

**Rekapitulasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2024**

NO	JENIS PAJAK	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JLH
1	PAJAK REKLAME	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
2	PAJAK SARANG BURUNG WALET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PBB-P2	283	161	113	173	227	302	383	491	419	285	340	213	3390
4	BPHTB	72	45	49	62	32	48	50	52	32	24	18	23	507
5	PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	3	1	-	-	14	-	6	8	-	5	6	15	58
6	PAJAK TENAGA LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PBJT-JASA PERHOTELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PBJT-JASA PARKIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	RETRIBUSI SEWA TANAH DAN BANGUNAN	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
	Jumlah	363	212	167	240	278	355	430	551	456	319	364	258	4017

Rekapitulasi Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK	TARGET	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JLH
1	PAJAK REKLAME	140.000.000	12.793.750	1.130.000	-	2.190.000	5.725.000	31.701.250	47.711.875	10.626.875	9.975.000	14.533.000	25.373.750	16.744.250	178.504.750
2	PAJAK SARANG BURUNG WALET	60.000.000	9.000.000	1.500.000	-	-	875.000	-	22.800.000	1.775.000	-	-	-	17.206.250	53.156.250
3	PBB-P2	4.000.000.000	69.172.471	47.774.318	34.811.440	79.112.310	205.046.492	316.109.831	657.215.232	675.242.626	910.152.735	386.496.071	211.441.238	211.590.893	3.804.165.657
4	BPHTB	10.496.500.000	573.084.600	372.256.386	414.183.401	322.064.250	468.042.000	328.051.500	596.135.250	809.251.905	657.046.655	522.149.000	365.219.137	1.134.436.720	6.561.920.804
5	PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	2.240.478.635	128.729.198	87.185.266	126.759.360	113.156.711	172.365.995	205.432.417	248.905.199	277.514.852	259.977.557	342.614.690	263.998.220	714.995.237	2.941.634.702
6	PAJAK TENAGA LISTRIK	15.350.000.000	1.408.840.653	1.387.680.951	1.368.807.648	1.411.023.691	1.447.050.214	1.448.107.650	1.464.263.661	1.412.595.796	1.421.693.995	1.402.020.546	1.446.629.435	1.488.830.038	17.107.544.278
7	PBJT-JASA PERHOTELAN	80.000.000	6.767.403	2.991.000	4.688.199	5.682.300	6.147.555	4.596.978	4.534.345	5.123.340	4.989.072	3.318.161	4.940.388	7.930.028	61.708.769
8	PBJT-JASA PARKIR	60.000.000	4.340.400	3.215.100	3.128.900	3.215.500	3.173.400	3.417.000	3.364.200	3.417.000	14.245.800	14.044.200	13.924.800	13.939.800	83.426.100
9	PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN	50.000.000	7.397.272	6.250.000	2.460.909	-	6.302.750	1.923.250	1.677.000	2.572.727	523.864	1.158.182	-	-	30.265.954
10	RETRIBUSI SEWA TANAH DAN BANGUNAN	9.000.000	900.000	100.000	100.000	300.000	866.500	4.832.500	1.026.650	325.000	-	1.500.000	-	-	9.950.650
	JUMLAH	32.485.978.635	2.221.025.747	1.910.083.021	1.954.939.857	1.936.744.762	2.315.594.906	2.344.172.376	3.047.633.412	3.198.445.121	3.278.604.678	2.687.833.850	2.331.526.968	3.605.673.216	30.832.277.914

Rekapitulasi Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTahun
2024

NO	JENIS PAJAK	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JLH
1	PAJAK REKLAME	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
2	PAJAK SARANG BURUNG WALET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PBB-P2	3	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	10
4	BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	3	1	4	3	6	6	6	5	4	7	4	2	51
6	PAJAK TENAGA LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PBJT-JASA PERHOTELAN	2	2	3	1	3	5	1	1	-	2	3	-	23
8	PBJT-JASA PARKIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	13
10	RETRIBUSI SEWA TANAH DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	14	11	13	11	16	16	15	15	15	16	16	16	174

Rekapitulasi Laporan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTahun 2024

NO	JENIS PAJAK	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jumlah
1	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

Rekapitulasi Evaluasi dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jumlah
1	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra

NO	U R A I A N	2020		PROSENTASE	2021		PROSENTASE	2022		PROSENTASE	2023		PROSENTASE	2024		PROSENTASE
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	PBJT-JASA PERHOTELAN	16,740,000.00	28,575,566.00	170.70	60,000,000.00	86,140,212.00	143.57	60,000,000.00	60,892,176.00	101.49	60.000.000,00	66.119.705,00	110,20	80.000.000	61.708.769	77,14
2.	PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	334,201,875.00	1,358,139,910.00	406.38	960,000,000.00	2,092,828,647.00	218.00	1,750,000,000.00	1,870,246,330.00	106.87	1.500.000.000,00	2.378.877.305,00	158,59	2.240.478.635	2.941.634.702	131,29
3.	PAJAK-JASA KESENIAN DAN HIBURAN	2,650,000.00	2,650,000.00	100.00	1,323,000.00	8,027,667.00	606.78	75,000,000.00	62,820,957.00	83.76	60.000.000,00	27.557.053,00	45,93	50.000.000	30.265.954	60,53
4.	PAJAK REKLAME	104,037,500.00	201,965,025.00	194.13	256,500,000.00	143,496,317.00	55.94	56,000,000.00	82,550,100.00	147.41	40.000.000,00	153.976.725,00	384,94	140.000.000	178.504.750	127,50
5.	PAJAK TENAGA LISTRIK	9,576,250,000.00	11,489,569,897.00	119.98	10,600,000,000.00	11,996,613,236.00	113.18	14,390,000,000.00	14,465,534,316.00	100.52	14.000.000.000,00	15.290.068.293,00	109,21	15.350.000.000	17.107.544.278	111,45
6.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA	355,029,031.00	881,130,001.99	248.19	415,000,000.00	380,981,020.00	91.80	24,259,000.00	24,775,250.00	102.13	-	-	-	-	-	-
7.	PBJT-JASA PARKIR	-	-	-	10,000,000.00	10,706,600.00	107.07	35,000,000.00	40,145,800.00	114.70	35.000.000,00	46.526.600,00	132,93	60.000.000	83.426.100	60,53
8.	PAJAK AIR TANAH	-	-	-	500,000.00	500,000.00	100.00	45,000,000.00	48,130,000.00	106.96	-	-	-	-	-	-
9.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	16,000,000.00	72,512,500.00	453.20	65,000,000.00	57,240,000.00	88.06	3,500,000,000.00	3,442,384,488.00	98.35	45.000.000,00	47.915.000,00	106,48	60.000.000	53.156.250	88,59
10.	PBB-P2	1,108,187,500.00	3,032,451,647.00	273.64	2,350,000,000.00	3,618,338,305.00	153.97	-	-	-	3.500.000.000,00	3.358.309.537,00	95,95	4.000.000.000	3.804.165.657	95,10
11.	BPHTB	4,000,000,000.00	6,016,491,555.00	150.41	11,100,998,000.00	12,892,338,782.00	116.14	5,800,000,000.00	5,210,526,146.00	89.84	7.000.000.000,00	7.584.324.014,00	108,35	10.496.500.000	6.561.920.804	62,52
12.	RETRIBUSI SEWA TANAH DAN BANGUNAN	3,813,752,515.00	3,889,140,784.00	101.98	1,227,630,365.00	1,017,885,296.00	82.91	7,500,000.00	51,954,000.00	692.72	7.500.000,00	4.910.000,00	65,47	9.000.000	9.950.650	110,56
JUMLAH		19,326,848,421.00	26,972,626,885.99	139.56	27,046,951,365.00	32,305,096,082.00	119.44	25,742,759,000.00	25,359,959,563.00	98.51	26.247.500.000,00	28.958.584.232,00	110,33	32.485.978.635	30.832.277.914	94,91

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA

SKPD / ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN : Desember 2024

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
							INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
								HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25,599	9,046,997,059.00	23,801	92.98	8,412,227,146	92.98	1.00	
5	1	01				Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5	1	01	01	01	1	Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Terbayarnya Gaji (OB), Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK (OB), Insentif Pemungutan Daerah (Trw)	Gaji, Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK, Insentif Pemungutan Pajak Daerah	12	5,010,100,103	12	100.00	4,502,701,309	89.87	0.90	
						JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			12	5,010,100,103	12	100.00	4,502,701,309	89.87	1.11	
5	02	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,437	65,541,880	1,377	95.82	62,219,840	94.93	0.99	
5	1	02	01	01	0024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Penggandaan HVS (Jenis)	1	20,981,880	1	100.00	20,579,840	98.08	0,00	
5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	Makanan dan Minuman Rapat	908	18,160,000	900	99.12	17,840,000	98.24	0.99	
5	1	02	02	01	0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Hari)	Honorarium Tenaga Administrasi Harian Lepas	528	26,400,000	476	90.15	23,800,000	90.15	1.00	
5	1	02	02	12		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		32	158,912,550	28	87.50	155,838,985	98.07	1.12	
5	1	02	02	12	0003			Belanja Bimbingan Teknis (OK)	11	56,000,000	11	100.00	55,000,000	98.21	0.98	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OK)	17	102,900,800	17	100.00	100,838,985	98.00	0.98	
							Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jenis)	Belanja Alat Tulis Kantor	4	11,750						
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum Perkantoran		11,540	878,308,330	11,474	99.43	866,091,756	98.61	1.01	

[illegible]

5	02	01	2	08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
5	1	02	01	01	0030			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Jenis)	126	5,552,010	126	100.00	5,512,005	99.28	1.01	
5	1	02	01	01	0036			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)	14	31,096,100	14	100.00	30,987,000	99.65	1.00	
5	1	02	01	01	0074			Belanja Pakaian Adat Daerah (Stel)	1	5,000,000	1	100.00	5,000,000	100.00	1.00	
5	1	02	02	01	0026			Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH)	528	26,400,000	508	96.21	25,400,000	96.21	1.00	
5	1	02	02	01	0030			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Harian (OH)	1,056	47,520,000	917	86.84	41,240,000	86.78	1.00	
5	1	02	02	01	0031			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Harian(OH)	744	33,480,000	730	98.12	32,850,000	98.12	1.00	
5	1	02	02	02	0006			Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN (OH)	252	604,800	224	88.89	537,600	88.89	1.00	
5	1	02	02	02	0007			Jaminan Kematian Kerja (JKM) Non ASN (OH)	252	756,000	224	88.89	672,000	88.89	1.00	
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Fasilitas Administrasi Umum Perkantoran		90	622,682,800	88	97.78	604,578,318	97.09	1.01	
5	02	01	02	09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		43	96,222,800	41	95.35	79,866,595	83.00	1.15	
5	1	02	01	01	0004			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Jenis)	4	50,672,800	4	100.00	38,112,000	75.21	1.33	
5	1	02	01	01	0013			Belanja Suku Cadang-Suku cadang Alat Angkutan (Unit)	5	22,000,000	5	100.00	21,999,008	100.00	0.00	
5	1	02	02	01	0067			Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Unit)	22	9,600,000	20	90.91	5,806,200	60.48	1.50	
5	1	02	03	02	0036			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Suku Cadang) (Unit)	6	12,000,000	6	100.00	11,999,387	99.99	1.00	
5	1	02	03	02	0038			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Unit)	6	1,950,000	6	100.00	1,950,000	100.00	1.00	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2	400,000,000	2	100.00	399,932,813	99.98	1.00	
05	02	01	02	09	0009			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kantor (Paket)	2	400,000,000	2	100.00	399,932,813	99.98	1.00	
5	02	01	2	09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		45	126,460,000	45	100.00	124,778,910	98.67	1.01	

05	1	02	02	01	0065			Belanja Penambahan Daya (Paket)	1	100,000,000	1	100.00	98,319,000	98.32	1.02	
5	1	02	03	02	0117			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Jenis)	44	26,460,000	44	100.00	26,459,910	100.00	1.00	
5	2	02	05	02	0006			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use (Buah)	1	0						
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah									
5	02	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		9,348.00	2,017,050,486	7,920	84.72	1,959,130,645	97.13	0.87	
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		3,147	681,249,525	2,663	84.62	656,537,125	96.37	0.88	
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Macam)	2	7,000						
5	1	02	01	01	0052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	1,189	50,751,000	1,189	100.00	50,748,000	99.99	1.00	
5	1	02	01	01	0058			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Porsi)	88	1,892,000	88	100.00	1,892,000	100.00	1.00	
05	01	02	02	01	0003			Honorarium Narasumber atau Pembina, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Orang/Jam)	16	28,800,000	16	100.00	28,800,000	100.00	1.00	
5	1	02	02	01	0026			Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH)	1584	79,200,000	1100	69.44	55,000,000	69.44	1.00	
5	1	02	02	01	0046			Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi (Paket)	1	200,000,000	1	100.00	199,500,000	99.75	1.00	
5	1	02	02	01	0063			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Bulan)	1	1,750,000	1	100.00	1,750,000	100.00	1.00	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	101	270,815,650	101	100.00	270,815,650	100.00	1.00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	167	48,033,875	167	100.00	48,031,475	100.00	1.00	
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Disusun		532	152,617,818	506	95.11	151,025,215	98.96	0.96	
5	1	02	01	01	0052			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	100	2,150,000	100	100.00	2,150,000	100.00	1.00	
5	1	02	02	01	0026			Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH)	264	13,200,000	238	90.15	11,900,000	90.15	1.00	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	11	102,424,300	11	100.00	102,196,386	99.78	1.00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	157	34,843,518	157	100.00	34,778,829	99.81	1.00	

						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah		753	338,558,425	701	93.09	335,735,572	99.17	0.94	
5	1	02	01	01	0024			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Macam)	-	0						
5	1	02	01	01	0058			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Porsi)	50	1,075,000	50	100.00	1,075,000	100.00	1.00	
05	01	02	02	01	0003			Honorarium Narasumber atau Pembina, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Orang/Jam)	12	5,400,000	12	100.00	5,400,000	100.00	1.00	
5	1	02	02	01	0026			Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH)	528	26,400,000	476	90.15	23,800,000	90.15	1.00	
5	1	02	02	01	0046			Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi (Paket)	1	10,000,000	1	100.00	10,000,000	100.00	1.00	
5	1	02	02	01	0063			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Bln)	12	91,250,000	12	100.00	91,027,150	99.76	1.00	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	39	175,637,250	39	100.00	175,637,247	100.00	1.00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	111	28,796,175	111	100.00	28,796,175	100.00	1.00	
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah		2,110	306,219,703	1,326	62.84	284,630,319	92.95	0.68	
								Belanja Figura Piagam (buah)	13	1,625,000						
5	1	02	01	01	0024			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14	356,070						
5	1	02	01	01	0026			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak (lembar)	23	10,800,000	22	95.65	8,625,000	79.86	1.20	
5	1	02	01	01	0052			Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	900	8,887,500	150	16.67	1,051,800	11.83	0.00	
05	01	02	02	01	0003			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (orang/jam)	17	17,500,000	11	64.71	10,600,000	60.57	0.00	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	75	148,315,700	75	100.00	148,006,953	99.79	1.00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	143	31,179,433	143	100.00	30,946,316	99.25	1.01	
								Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	925	87,556,000	925	100.00	85,400,250	97.54	1.03	
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah		2,096	289,096,222	2,070	98.76	288,671,335	99.85	0.99	
5	1	02	01	01	0024			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spanduk/ Banner (Macam)	2	16,008,491	2	100.00	16,000,000	99.95	0.00	

5	1	02	01	01	0052			Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	1,400	25,575,000	1400	100.00	25,542,000	99.87	0.00	
05	01	02	02	01	0003			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (orang/jam)	11	10,400,000	11	100.00	10,400,000	100.00	0.00	
5	1	02	02	01	0026			Belanja Jasa Tenaga Administrasi Harian (OH)	264	12,100,000	238	90.15	11,900,000	98.35	0.00	
5	1	02	02	05	0009			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (orang/paket)	30	33,350,000	30	100.00	33,283,000	99.80	0.00	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	30	128,669,500	30	100.00	128,576,982	99.93	0.00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	359	62,993,231	359	100.00	62,969,353	99.96	1.00	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		710	249,308,793	654	92.11	242,531,079	97.28	0.95	
5	1	02	01	01	0024			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jenis)	1	14,898,250	1	100.00	10,944,400	73.46	1.36	
5	1	02	01	01	0052			Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	450	14,800,000	395	87.78	12,650,000	85.47	1.03	
05	01	02	02	01	0003			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (orang/jam)	10	8,800,000	10	100.00	8,400,000	95.45	1.05	
5	1	02	04	01	0001			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (OH)	48	178,732,900	48	100.00	178,726,704	100.00	1.00	
5	1	02	04	01	0003			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	201	32,077,643	200	99.50	31,809,975	99.17	1.00	
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG			25,587	4,036,896,956	23,789	92.97	3,909,525,837	96.84	0.96	
						JUMLAH BELANJA (total)			25,599	9,046,997,059	23,801	92.98	8,412,227,146	92.98	1.00	

Kesimpulan :

- 1

Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik Total (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)

92.98

Persen
- 2

Prosentasi Pengunaaan Keuangan (berdasarkan jumlah input/pagu seluruh kegiatan)

92.98

Persen

Marabahan, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 197605191997031007



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si**
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DINANSYAH, S.Sos., M.M**
Jabatan : Pj. BUPATI BARITO KUALA
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, September 2024

**Pihak Kedua,
Pj. BUPATI BARITO KUALA**

DINANSYAH, S.Sos., M.M

**Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUS DAERAH**

DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	32.076.978.635	4.811.546.795	8.019.244.658	11.226.942.524	8.019.244.658
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	9.000.000	1.350.000	2.250.000	3.150.000	2.250.000
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	74,94	-	-	-	74,94

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Rp 5.447.661.265	APBD Kabupaten
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 1.421.162.726	APBD Kabupaten

Marabahan, September 2024

Pihak Kedua,

DINANSYAH, S.Sos., M.M

Pihak Pertama,



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD ARSYAD, MP

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB. BARITO KUALA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 25 April 2024

Pihak Kedua

DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Pihak Pertama

H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
NIP. 19660504 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN

BARITO KUALA

TAHUN 2024

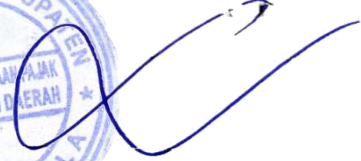
No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target 2024	TARGET			
					TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	Nilai	25,11	-	-	-	25,11
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	Nilai	21,27	-	-	-	21,27
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	Nilai	10,59	-	-	-	10,59
4	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	Nilai	17,97	-	-	-	17,97
5	Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	%	100	100	100	100	100

Uraian	Kegiatan	Anggaran Rupiah	Sumber Dana
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135.589.050,00	APBD Kabupaten
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.632.250,00	APBD Kabupaten
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.297.540,00	APBD Kabupaten
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.145.000,00	APBD Kabupaten
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.053.720,00	APBD Kabupaten
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.062.500,00	APBD Kabupaten
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.137.250,00	APBD Kabupaten

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.428.000,00	APBD Kabupaten
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000,00	APBD Kabupaten
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.491.285,00	APBD Kabupaten
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.782.800,00	APBD Kabupaten
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	APBD Kabupaten
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.800.000,00	APBD Kabupaten
Total	-	1.006.419.395,00	-

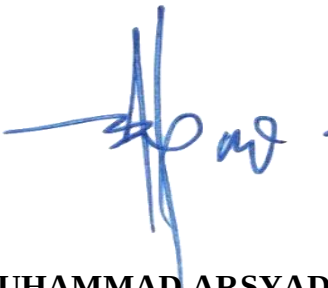
Marabahan, 25 April 2024

Pihak Pertama



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Pihak Kedua



H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
NIP. 19660504 199703 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ARINI NURLAILA SARI, SE
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua


H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
NIP. 19660504 199703 1 005

Pihak Pertama


ARINI NURLAILA SARI, SE
NIP. 19890424 201503 2 002

PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek	100%	100%	100%	100%	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek	11 orang	-	5	3	3
Terlaksananya Administrasi Umum BPPRD	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan Kantor	8 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	28 Macam	5 Macam	8 Macam	7 Macam	8 Macam
	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	-	-	3 Jenis	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat	1.004 Porsi	100 Porsi	250 Porsi	300 Porsi	354 Porsi
	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu	150 Porsi	-	50 Porsi	50 Porsi	50 Porsi
	Jumlah Porsi Makan dan Minum Pegawai	10164 Porsi	1.800 Porsi	3.388 Porsi	1.588 Porsi	3.388 Porsi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan dan Jenis Berkas yang disediakan	8 Jenis	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang tersedia	45 Eksemplar	11 Eksemplar	11 Eksemplar	11 Eksemplar	12 Eksemplar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi dan Keluar Povinsi	99 OH	20 OH	35 OH	24 OH	20 OH
Terlaksannanya Penyediaan Jasa Penunjang BPPRD	Tersediannya Jasa Penunjang BPPRD	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	119 Lembar	59 Lembar	-	-	60 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, Air, Internet dan Telpon yang dibayarkan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang Disediakan	19 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	-	4 Jenis
	Belanja Pakaian Adat	1 set	1 set	-	-	-
	Honor jasa tenaga administrasi yang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang

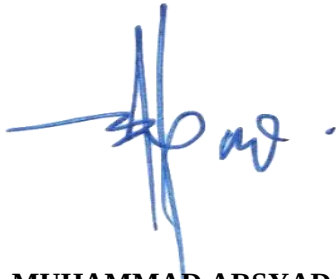
	dibayarkan					
	Honor jasa tenaga Kebersihan yang dibayarkan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang
	Honor jasa tenaga Keamanan yang dibayarkan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah BPPRD</i>	<i>Tersediannya Pemeliharaan barang Milik daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dan Genset yang dibayarkan untuk BBM dan Pelumas	22 Unit	6 Unit	8 Unit	-	8 Unit
	Jumlah Suku Cadang yang dibayarkan	5 Unit	-	2 Unit	2 Unit	1 Unit
	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang dibayarkan	22 Buah	-	11 Bua	-	11 Buah
	Biaya kendaraan Roda 4 yang diPelihara	2 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali
	Biaya kendaraan Roda 2 yang diPelihara	18 Kali	-	9 Kali	-	9 Kali
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Service AC, Komputer/Notebook, Printer dan CCTV	40 Unit	8 Unit	30 Unit	-	2 Unit
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Unit	-	-	-	1 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.589.050,00	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	135.589.050,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.328.260,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.632.250,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.297.540,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.145.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.053.720,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.062.500,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.137.250,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.919.285,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	1.428.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	132.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.491.285,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.582.800,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.782.800,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	25.800.000,00	
JUMLAH	1.006.419.395,00	

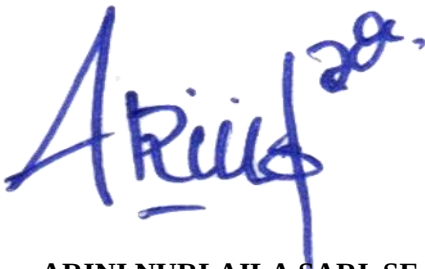
Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua



H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
NIP. 19660504 199703 1 005

Pihak Pertama



ARINI NURLAILA SARI, SE
NIP. 19890424 201503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JUANAH, S.Sos
Jabatan : PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : ARINI NURLAILA SARI, SE
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua


ARINI NURLAILA SARI, SE
NIP. 19890424 201503 2 002

Pihak Pertama


JUANA H, S.Sos
NIP. 19701201 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek	100%	100%	100%	100%	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek	11 orang	-	5	3	3
Terlaksananya Administrasi Umum BPPRD	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik Penerangan Kantor	8 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	28 Macam	5 Macam	8 Macam	7 Macam	8 Macam
	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	-	-	3 Jenis	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat	1.004 Porsi	100 Porsi	250 Porsi	300 Porsi	354 Porsi
	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu	150 Porsi	-	50 Porsi	50 Porsi	50 Porsi
	Jumlah Porsi Makan dan Minum Pegawai	10164 Porsi	1.800 Porsi	3.388 Porsi	1.588 Porsi	3.388 Porsi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan dan Jenis Berkas yang disediakan	8 Jenis	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang tersedia	45 Eksemplar	11 Eksemplar	11 Eksemplar	11 Eksemplar	12 Eksemplar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi dan Keluar Povinsi	99 OH	20 OH	35 OH	24 OH	20 OH
Terlaksannnya Penyediaan Jasa Penunjang BPPRD	Tersediannya Jasa Penunjang BPPRD	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	119 Lembar	59 Lembar	-	-	60 Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, Air, Internet dan Telpn yang dibayarkan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang Disediakan	19 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	-	4 Jenis
	Belanja Pakaian Adat	1 set	1 set	-	-	-
	Honor jasa tenaga administrasi yang dibayarkan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang

	Honor jasa tenaga Kebersihan yang dibayarkan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang
	Honor jasa tenaga Keamanan yang dibayarkan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah BPPRD</i>	<i>Tersediannya Pemeliharaan barang Milik daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dan Genset yang dibayarkan untuk BBM dan Pelumas	22 Unit	6 Unit	8 Unit	-	8 Unit
	Jumlah Suku Cadang yang dibayarkan	5 Unit	-	2 Unit	2 Unit	1 Unit
	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang dibayarkan	22 Buah	-	11 Bua	-	11 Buah
	Biaya kendaraan Roda 4 yang diPelihara	2 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali
	Biaya kendaraan Roda 2 yang diPelihara	18 Kali	-	9 Kali	-	9 Kali
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Service AC, Komputer/Notebook, Printer dan CCTV	40 Unit	8 Unit	30 Unit	-	2 Unit
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Unit	-	-	-	1 Unit

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.589.050,00	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	135.589.050,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.328.260,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.632.250,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.297.540,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.145.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.053.720,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.062.500,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.137.250,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.919.285,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	1.428.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	132.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.491.285,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.582.800,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.782.800,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	25.800.000,00	
JUMLAH	1.006.419.395,00	

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua

ARINI NURLAILA SARI, SE
NIP. 19890424 201503 2 002

Pihak Pertama

JUANA H. S. Sos
NIP. 19701201 198903 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : GUNAWAN, S.Kom
Jabatan : AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : ARINI NURLAILA SARI, SE
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua

ARINI NURLAILA SARI, SE
NIP. 19890424 201503 2 002

Pihak Pertama

GUNAWAN S.Kom
NIP. 19890927 202321 1 000



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AZHAR JAUHARI, S.Kom
Jabatan : AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : ARINI NURLAILA SARI, SE
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Mei 2024

Pihak kedua

ARINI NURLAILA SARI, SE
NIP. 19890424 201503 2 002

Pihak Pertama

AZHAR JAUHARI S.Kom
NIP. 19990419 202421 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SISCA AYITA SARI, S.Sos
Jabatan : AHLI PERTAMA – ARSIPARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : ARINI NURLAILA SARI, SE
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

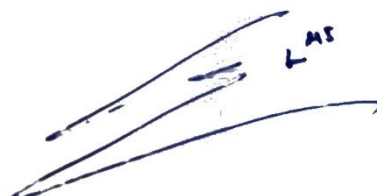
Marabahan, 2 Mei 2024

Pihak kedua



ARINI NURLAILA SARI, SE
NIP. 19890424 201503 2 002

Pihak Pertama



SISCA AYITA SARI, S.Sos
NIP. 19830714 202421 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RUSWATI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua

H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
NIP. 19660504 199703 1 005

Pihak Pertama

RUSWATI, SE
NIP. 19691010 200604 2 017

PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG PROGRAM KEUANGAN DAN ASET
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Triwulan			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	1	2	3
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Perencanaan	Dokumen	-	-	1	1
	Penyusunan Laporan Penganggaran	Dokumen	-	-	1	1
	Pengevaluasian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	6	6
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Insentif	Bulan/ Tahun	3	3	3	3

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua



H. MUHAMMAD ARSYAD, MP
NIP. 19660504199703 1 005

Pihak Pertama



RUSWATI, SE
NIP. 19691010 200604 2 017



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : NANANG ISMAIL
Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : RUSWATI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak kedua

RUSWATI, SE
NIP. 19691010 200604 2 017

Pihak Pertama

NANANG ISMAIL
NIP. 19791222 201406 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AHMAD RIADHUSSHALIHIN, A.Md.Kom
Jabatan : TERAMPIL – PRANATA KOMPUTER

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : RUSWATI, SE
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Mei 2024

Pihak kedua

RUSWATI, SE
NIP. 19691010 200604 2 017

Pihak Pertama

AHMAD RIADHUSSHALIHIN A.Md.Kom
NIP. 20001025 202421 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBY WULANDARI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB. BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Meningkatnya Pengembangan Potensi dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak Daerah	%	25	35	25	15
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	%	25	25	35	15

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASRUDDIN, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEBBY WULANDARI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

Pihak Pertama

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak Hasil analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	OP	396	396	264	264

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

Pihak Pertama



MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SAPUTRI, SE
Jabatan : ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MASRUDDIN, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

Pihak Pertama

DEWI SAPUTRI, SE
NIP. 19870706 2022032003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak Hasil analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	OP	396	396	264	264

Pihak Kedua


MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

Marabahan, 2 Januari 2024
Pihak Pertama


DEWI SAPUTRI, SE
NIP. 19870706 2022032003



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYANG SEGARAN PRATAMA, S.Ak.
Jabatan : AHLI PERTAMA – PENILAI PEMERINTAH
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MASRUDDIN, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

MAYANG SEGARAN PRATAMA, S.Ak.
NIP. 19961016 2022032009

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak Hasil analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	OP	396	396	264	264

Pihak Kedua


MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

Marabahan, 2 Januari 2024
Pihak Pertama


MAYANG SEGARAN PRATAMA, S.Ak.
NIP. 19961016 2022032009



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIVI RISMALianti, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEBBY WULANDARI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

Pihak Pertama

VIVI RISMALianti, S.Sos
NIP. 19851013 201503 2 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Layannan dan Konsultasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	WP	594	594	396	396

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

Pihak Pertama



VIVI RISMALIAN TI, S.Sos
NIP. 19851013 201503 2 001



PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

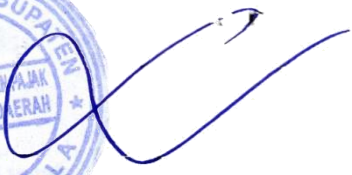
Nama : DAHTIAR FAJAR, S.STP,MSi
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB. BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Pihak Pertama


ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Meningkatnya Penagihan dan Pemeriksaan	Persentase Peningkatan Pembayaran Piutang Pajak Daerah	%	15	25	35	25
		Persentase Wajib Pajak Daerah yang taat pasca Pembinaan dan Pemeriksaan	%	25	25	25	25

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DAHTIAR FAJAR, S.STP,MSi
NIP. 19760519 199703 1 007

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYANTO SHOLEH JM, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBINAAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 15 Maret 2024

Pihak Kedua

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

Pihak Pertama

HRT SHOLEH JM, S.Sos
NIP. 19680616 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp	4.014.720.000	6.691.200.000	9.367.680.000	6.691.200.000

Marabahan, 15 Maret 2024

Pihak Kedua



ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

Pihak Pertama



HRT SHOLEH JM, S.Sos
NIP. 19680616 201001 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBINAAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

Pihak Pertama

AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
NIP. 19740814 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dibina dan diperiksa	WP	30	30	30	30

Pihak Kedua



ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Pertama



AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
NIP. 19740814 199503 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI AKBAR, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB. BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Pihak Pertama

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian	Persentase Penyampaian Laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Benar dan Tepat Waktu	%	25	25	25	25
		Persentase Penyampaian Laporan evaluasi dan pengendalian yang Benar dan Tepat Waktu	%	25	25	25	25

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007

Pihak Pertama

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIANA, S.Kom
Jabatan : Plt. KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALI AKBAR, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

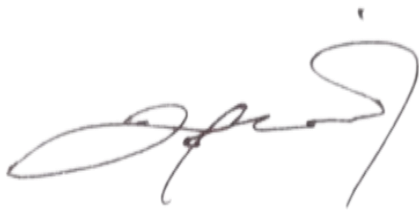
MARIANA, S.Kom
NIP. 19830227 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	4	4

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

Pihak Pertama



MARIANA, S.Kom
NIP. 19830227 200604 2 010



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATIK NOR AINA, SE
Jabatan : ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MARIANA, S.Kom
Jabatan : Plt. KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MARIANA, S.Kom
NIP. 19830227 200604 2 010

TATIK NOR AINA, SE
NIP. 19831204 200904 2 007

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	4	4

Pihak Kedua



MARIANA, S.Kom

NIP. 19830227 200604 2 010

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Pertama



TATIK NOR AINA, SE

NIP. 19831204 200904 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI MURDIANAH, M.Ak
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALI AKBAR, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

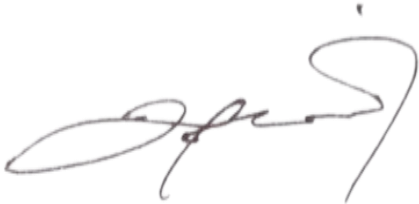
Pihak Pertama

SRI MURDIANAH, M.Ak
NIP. 19780623 200501 2 011

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	12	12

Pihak Kedua



ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

Marabahan, 2 Januari 2024
Pihak Pertama



SRI MURDIANAH, M.Ak
NIP. 19780623 200501 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORLINA, A.Md
Jabatan : PRANATA KOMPUTER
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI MURDIANAH, M.Ak
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

SRI MURDIANAH, M.Ak
NIP. 19780623 200501 2 011

Pihak Pertama

NORLINA, A.Md
NIP. 19840717 200904 2 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	12	12

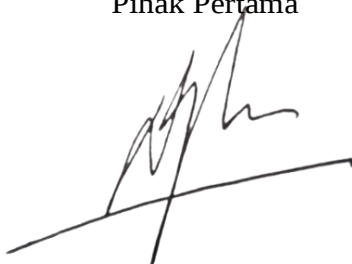
Marabahan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua



SRI MURDIANAH, M.Ak
NIP. 19780623 200501 2 011

Pihak Pertama



NORLINA, A.Md
NIP. 19840717 200904 2 003

